

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019



**DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA**

KABUPATEN TANAH LAUT

KATA PENGANTAR

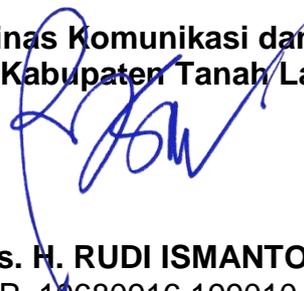
Puji dan syukur sepantasnya kita haturkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat kuasa dan ijin-Nya jualan Laporan Kinerja (LAPKIN) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 dapat diselesaikan pada waktunya. LAPKIN tersebut merupakan media pertanggungjawaban kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pelaksanaan misi dan pencapaian visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut 2018-2023.

LAPKIN dapat digunakan oleh setiap aparatur mulai dari staf sampai pimpinan puncak instansi atau unit kerja yang peduli akan kinerja instansinya sehingga akan memperoleh manfaat dari LAPKIN ini, dan dapat dipakai untuk melaksanakan strategi guna meningkatkan kinerja instansi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

Akhirnya kami mengharapkan agar LAPKIN ini oleh setiap jajaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut khususnya dan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut pada umumnya dapat dijadikan bahan oleh para perencana/penata program untuk mengimplementasikan perencanaan kinerja dalam rangka penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaihari, Februari 2020

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanah Laut.**



Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi SAKIP guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut terdiri 3 Esselon III, yaitu Sekretaris, Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government, Kepala Bidang Statistik dan Persandian, dan Kepala Bidang Komunikasi. Sedangkan Esselon IV sejumlah 8 Jabatan (2 Kasubbag dan 6 Kasi).

Pengembangan dan pelaksanaan program/kegiatan urusan komunikasi dan informatika Kabupaten Tanah Laut merupakan upaya untuk mewujudkan Visi (Tanah Laut yang Berinteraksi) dan Misi Bupati Tanah Laut, **Misi (1)** Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya; **Misi (2)** Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif; **Misi (3)** Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Strategi pencapaian tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut secara umum menyesuaikan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023. Pengembangan dan pelaksanaan program/kegiatan urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Renstra Tahun 2018-2023 berorientasi pada sasaran Meningkatnya pengembangan dan

pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik); Meningkatnya penggunaan domain resmi pemerintah Kabupaten Tanah Laut; Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Tanah Laut; Meningkatnya pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi; Meningkatnya SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi); dan Meningkatnya kualitas data statistik sektoral SKPD. Strategi yang disusun untuk mengembangkan komunikasi dan informatika dalam rangka mendukung terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yaitu Peningkatan kualitas SDM di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); Melakukan kerjasama dengan instansi/SKPD terkait maupun perguruan tinggi dalam hal pengembangan e-government; Meningkatkan pemanfaatan TIK dalam proses kerja dan layanan publik dengan sistem data terintegrasi; Meningkatkan cakupan media informasi publik; Melakukan kerjasama kemitraan dan hubungan dengan media komunikasi; Meningkatkan pengelolaan opini dan isu publik daerah; Meningkatkan layanan rekomendasi pendirian menara telekomunikasi di Kabupaten Tanah Laut; Meningkatkan pemanfaatan tanda tangan elektronik dalam menjaga keamanan dokumen; Menyediakan data statistik sektoral daerah; Pembangunan pusat data yang terintegrasi dengan SKPD. Adapun program yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut adalah Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media, Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Kominfo; Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa; Program Pengembangan Data/Informasi; Program Pengelolaan Komunikasi Publik; dan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

Secara garis besar kinerja pelayanan SKPD didasarkan pada kualitas layanan e-Government, yang diukur keberhasilannya melalui Indikator Kinerja indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mengacu pada Perpres RI Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pada Tahun 2019 ini Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah mengikuti Piloting Pelaksanaan SPBE guna meningkatkan nilai/indeks SPBE. Nilai/indeks SPBE yang diperoleh Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2019 ini sebesar **2,76** dengan predikat penilaian **baik**. Hal ini merupakan hasil kerja keras Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan implementasi SPBE di Kabupaten Tanah Laut.

Evaluasi pengukuran kinerja tahun 2019 berdasarkan pada 4 program, pada umumnya dapat terealisasi semuanya, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | 2019 | | |
|-----|---|--|--------|-----------|---------------------|
| | | | TARGET | REALISASI | PERSEN TASE CAPAIAN |
| 1 | Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Tanah Laut | Persentase informasi yang disebarakan | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Meningkatnya pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi | Persentase KIM yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Meningkatnya SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi) | Persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi) | 27% | 27% | 100% |
| 4 | Meningkatnya kontribusi dinas dalam pelayanan administratif dan layanan publik guna mendukung industri kreatif | Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi | 100 % | 100 % | 100% |
| 5 | Meningkatnya pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut | Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) | 2,0 | 2,76 | 138% |
| 6 | Meningkatnya pengembangan dan | Persentase SKPD yang menerapkan SPBE | 8,9% | 8,9% | 100% |

| | | | | | |
|----|--|---|------|-------|-------------|
| | pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) | (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) | | | |
| 7 | Meningkatnya penggunaan domain resmi pemerintah Kabupaten Tanah Laut | Persentase kenaikan penggunaan domain tanahlautkab.go.id | 10% | 10% | 100% |
| 8 | Meningkatnya tata kelola administrasi umum dan kepegawaian | Persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu | 100% | 94% | 94% |
| 9 | Meningkatnya kualitas pelaporan dan perencanaan | Nilai SAKIP SKPD | 70 | 71,18 | Kategori BB |
| 10 | Meningkatnya kualitas data statistik sektoral SKPD | Persentase statistik sektoral daerah | 80% | 80% | 100% |

Realisasi Anggaran Belanja Langsung (APBD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tahun 2019 dari Anggaran Rp. 3.437.925.459,60 terealisasi sebesar Rp. 2.992.782.867,- (87,05%), dan fisik 87,83%. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (APBD) tahun 2019 dari Anggaran Rp. 3.451.284.867,- terealisasi sebesar Rp. 2.994.924.371,- (86,78%). Realisasi anggaran pendapatan daerah dari hasil Retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Tanah Laut adalah dari target Rp. 471.936.000,- terealisasi 447.356.000,- (94,79%).

Untuk masa mendatang, kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut akan terus ditingkatkan, dengan melakukan beberapa hal, antara lain:

1. Peningkatan kualitas SDM aparatur, melalui pelatihan, bimbingan teknis maupun peningkatan strata pendidikan.
2. Meningkatkan fasilitas sarana/prasarana komunikasi dan informasi guna menunjang pelaksanaan SPBE dan Keterbukaan Informasi Publik.
3. Melaksanakan Koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain terkait pengembangan dan inovasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

DAFTAR ISI

| | Hal |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | ii |
| DAFTAR ISI | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi (Bagan SOTK) | 6 |
| C. Produk dan Layanan | 16 |
| D. Sistematika Penyajian | 16 |
| BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 19 |
| A. Visi RPJMD | 19 |
| B. Misi RPJMD | 19 |
| C. Tujuan sesuai Renstra | 20 |
| D. Sasaran Strategis | 22 |
| E. Tabel (Tujuan, Indikator, Target, Sasaran, Indikator, Target 5 Tahun) | 23 |
| F. Indikator Kinerja Utama | 24 |
| G. Program dan Kegiatan | 25 |
| H. Perjanjian Kinerja 2019 | 27 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 34 |
| A. Capaian Indikator Kinerja Utama | 34 |
| 1. Target dan Capaian IKU | 34 |
| 2. Uraian dan Analisa Capaian IKU | 35 |
| B. Capaian Sasaran Strategis | 47 |
| 1. Capaian Sasaran Strategis sesuai Renstra dan Target | 47 |
| 2. Tabel Realisasi Capaian Sasaran Strategis | 48 |
| 3. Uraian dan Analisa Capaian Sasaran strategis | 49 |
| C. Akuntabilitas Keuangan | 94 |
| 1. Ringkasan realisasi APBD Tahun 2019 | 94 |
| - Belanja Langsung | |
| - Belanja Tidak Langsung | |
| BAB IV PENUTUP | 99 |
| A. Simpulan | 99 |
| B. Strategi Peningkatan Kinerja | 101 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN).

Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban dan pertanggungjawaban keberhasilan pelaksanaan visi dan misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dasar dalam pembuatan Laporan Kinerja Tahun 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut ini ialah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Umum di lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut;
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 tentang Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 82 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

LAPKIN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut yaitu dalam mendukung Visi Bupati Tanah Laut **“Terwujudnya Tanah Laut Yang Berinteraksi (BERkarya,**

INovasi, TEtata, Religius, AKtual, SInergi)” melalui pelaksanaan program/kegiatan pada Telaahan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut, yakni: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut terkait dengan pelaksanaan **Misi (1)** Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya; **Misi (2)** Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif; **Misi (3)** Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Di dalam RPJP memberikan arah kebijakan pembangunan sektor komunikasi dan informasi antara lain untuk meningkatkan pemanfaatan peran komunikasi melalui media massa modern dan media massa tradisional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk kepribadian bangsa, serta mengupayakan keamanan hak pengguna sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, meningkatkan kualitas komunikasi di berbagai bidang melalui penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna memperkuat daya saing bangsa dalam menghadapi tantangan global, meningkatkan peran pers yang bebas, membangun jaringan informasi dan komunikasi antara pusat dengan daerah dan antar daerah dalam rangka mendukung pembangunan nasional serta ke mancanegara untuk memperjuangkan kepentingan nasional, memperkuat kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

Dari arahan RPJP menunjukkan bahwa arah kebijakan pembangunan sektor komunikasi dan informasi antara lain adalah untuk mendorong pemberdayaan potensi masyarakat. Pemerintah punya tanggung jawab yang besar dalam menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di

Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut dan menciptakan keterbukaan informasi, kebebasan informasi dan kebebasan pers yang kondusif bagi pengembangan peran serta masyarakat dalam era globalisasi informasi. Oleh karena itu secara konsisten, segenap komponen bangsa Indonesia dan khususnya masyarakat Kabupaten Tanah Laut perlu turut serta mendapatkan iklim yang kondusif untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan. Dengan demikian kebebasan di bidang informasi dan komunikasi diarahkan untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan pelayanan publik.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sesuai rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018–2023, tentunya perlu didukung oleh setiap SKPD sesuai dengan bidang dan urusannya, begitu pula dengan Dinas Komunikasi dan Informasi yang merupakan bagian tak terpisahkan guna mendukung keberhasilan RPJMD melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yaitu :

1. Terwujudnya penyebaran informasi di Kabupaten Tanah Laut;
2. Terwujudnya inovasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut;
3. Terwujudnya SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut;
4. Terwujudnya pengembangan dan pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik);
5. Terwujudnya tata kelola administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
6. Terwujudnya pengelolaan statistik yang akurat di Kabupaten Tanah Laut.

B. Struktur Organisasi Tugas dan fungsi

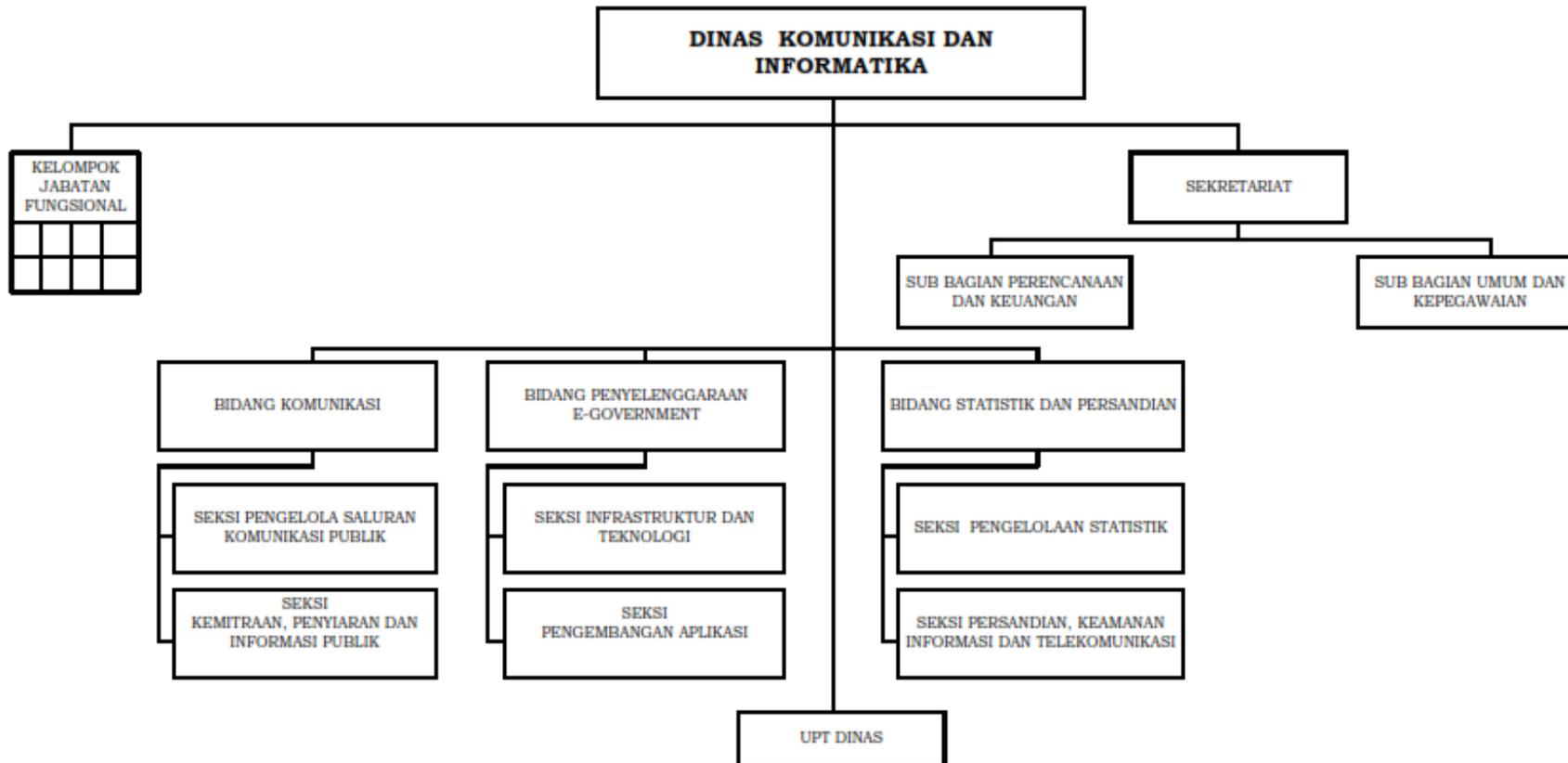
Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan bagian dari SKPD di Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

Dinas Komunikasi dan Informasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dalam urusan pemerintahan komunikasi dan informatika yang dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika dapat di lihat pada bagan beserta uraian tugas sebagai berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 77 TAHUN 2016
 TANGGAL : 14 DESEMBER 2016



BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanah Laut adalah :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Komunikasi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengelola Saluran Komunikasi Publik; dan
 - 2) Seksi Kemitraan Penyiaran dan dan Komunikasi Publik.
- d. Bidang Penyelenggaraan E-Government, terdiri dari :
 - 1) Seksi Infrastruktur dan Teknologi; dan
 - 2) Seksi Pengembangan Aplikasi.
- e. Bidang Statistik dan Persandian, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengelolaan Statistik; dan
 - 2) Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi.
- f. Unit Pelaksana Teknis

Kepala Dinas

- (1) Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, bidang persandian, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;

- d. pelaksanaan administrasi dinas;
- e. pembinaan UPT Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

- (1) Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.
- (2) Mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - d. penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - e. penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perengkapan;
 - f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
 - g. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;

- i. pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
- j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi dari:

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

Bidang Komunikasi

- (1) Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi.
- (2) Menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja bidang komunikasi;
 - b. perumusan kebijakan bidang komunikasi;

- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang komunikasi;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang komunikasi;
- e. pelaksanaan kebijakan pengelolaan saluran komunikasi publik;
- f. pelaksanaan kebijakan kemitraan, penyiaran dan informasi publik;
- g. penyiapan bahan rekomendasi izin bidang komunikasi;
- h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Komunikasi membawahi dari:

- 1) Seksi Pengelola Saluran Komunikasi Publik; dan
- 2) Seksi Kemitraan, Penyiaran dan Informasi Publik.

Seksi Pengelola Saluran Komunikasi Publik

- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pengelolaan saluran komunikasi publik.

Seksi Kemitraan, Penyiaran dan Informasi Publik

- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kemitraan, penyiaran dan informasi publik.

Bidang Penyelenggaraan E-Government

- (1) Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan E-Government.
- (2) Menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja bidang penyelenggaraan E-Government;
 - b. perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan E-Government;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang penyelenggaraan E-Government;
 - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan E-Government;
 - e. pelaksanaan kebijakan pengelolaan infrastruktur dan teknologi;
 - f. pelaksanaan kebijakan pengembangan aplikasi;
 - g. penyiapan bahan rekomendasi izin bidang E-Government;
 - h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan E-Government;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Penyelenggaraan E-Government membawahi dari:

- 1) Seksi Infrastruktur dan Teknologi; dan
- 2) Seksi Pengembangan Aplikasi.

Seksi Infrastruktur dan Teknologi

- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait infrastruktur dan teknologi.

Seksi Pengembangan Aplikasi

- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan aplikasi.

Bidang Statistik dan Persandian

- (1) Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan statistik dan persandian.
- (2) Menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja bidang statistik dan persandian;
 - b. perumusan kebijakan bidang statistik dan persandian;
 - c. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang statistik dan persandian;
 - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang statistik dan persandian;
 - e. pelaksanaan kebijakan pengelolaan statistik;
 - f. pelaksanaan kebijakan pengelolaan persandian;
 - g. pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait;
 - h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik dan persandian;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Statistik dan Persandian membawahi dari:

- 1) Seksi Pengelolaan Statistik; dan
- 2) Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi.

Seksi Pengelolaan Statistik

- mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan statistik.

Seksi Persandian

- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan persandian.

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2019, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut memiliki pegawai sebanyak 24 (dua puluh empat) orang. Dari jumlah pegawai sebanyak 24 orang tersebut, terdiri dari; Kepala Dinas (Pimpinan Tinggi Pratama) sebanyak 1 orang, Sekretaris (Pejabat Administrator) sebanyak 1 orang, Kepala Bidang (Pejabat Administrator) sebanyak 3 orang, Kepala Seksi (Pejabat Pangawas) sebanyak 7 orang dan 1 staf sebagai pelaksana tugas Kepala Seksi, staf pelaksana sebanyak 11 orang. Detail lebih lanjut tentang komposisi kepegawaian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1 Komposisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

| No | Uraian | Eselon I | Eselon II | Eselon III | Eselon IV | Staf | Jumlah |
|----|---------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Kepala Dinas | | 1 | | | | 1 |
| 2 | Sekretaris | | | 1 | | | 1 |
| 3 | Kepala Bidang | | | 3 | | | 3 |
| 4 | Kepala Seksi | | | | 8 | | 8 |
| 5 | Staf PNS | | | | | 11 | 11 |
| | JUMLAH | | 1 | 4 | 8 | 11 | 24 |

Golongan III menempati jumlah terbanyak di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sebanyak 9 orang, diikuti golongan II sebanyak 8 orang, golongan IV sebanyak 7 orang serta ditambah tenaga kontrak/Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 11 (sebelas) orang. Selain pegawai berstatus PNS dan Pegawai PTT, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut juga dibantu oleh 10 (sepuluh) orang tenaga ahli.

Untuk menunjang efektifitas kinerja, pemetaan terhadap pendidikan yang ditamatkan oleh pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan. Hasil pemetaan pendidikan pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat di tabel 1.2.

Tabel 1.2 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

| No | Uraian | S3 | S2 | S1 | D3 | SLTA | SLTP | SD | Jumlah |
|----|---------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 1 | Kepala Dinas | | 1 | | | | | | 1 |
| 2 | Sekretaris | | 1 | | | | | | 1 |
| 3 | Kepala Bidang | | 1 | 2 | | | | | 3 |
| 4 | Kepala Seksi | | 1 | 5 | 1 | | | | 7 |
| 5 | Staf | | 1 | 3 | 4 | 4 | | | 12 |
| | JUMLAH | 0 | 5 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 24 |

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

Dari seluruh jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, sebanyak 5 orang memiliki pendidikan S2, yaitu Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang 1 orang dan Kepala Seksi 1 orang. Yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 10 orang, D3 sebanyak 5 orang dan SLTA sebanyak 4 orang.

Terkait dengan LAPKIN, evaluasi akan dilakukan terhadap jumlah pegawai, serta pendidikan dari sumber daya yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, untuk melihat apakah sudah diperlukan penambahan SDM, peningkatan pendidikan, atau kursus-kursus/bimtek yang

diperlukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

C. Produk dan Layanan

Pelayanan yang diselenggarakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, sesuai dengan mekanisme prosedur pelayanan, di antaranya :

- a. Penyiaran iklan layanan masyarakat
- b. Peliputan dan penyiaran
- c. Pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi)
- d. Pemberian rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi
- e. Pengendalian hak akses data
- f. Pemeliharaan dan akses data center
- g. Layanan lapor.go.id Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
- h. Manajemen dan akses data jaringan (*network*)
- i. Pembuatan domain *website* resmi satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Desa dan organisasi masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- j. *Co-Location* / Penempatan server dan hosting aplikasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
- k. *Back-up* dan *restore database server* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
- l. *Update website*
- m. Layanan data sektoral
- n. Tata kelola berita sandi

D. Sistematisasi Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut selama tahun 2019. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa akan datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja.

Dalam pembuatan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut untuk tahun 2019 ini tim penyusun membagi dalam beberapa pokok bahasan sebagai berikut, yaitu :

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi
- C. Produk dan Layanan
- D. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Visi RPJMD
- B. Misi RPJMD
- C. Tujuan sesuai Renstra
- D. Sasaran Strategis
- E. Tabel (Tujuan, Indikator, Target, Sasaran, Indikator, Target 5 Tahun)
- F. Indikator Kinerja Utama
- G. Program dan Kegiatan
- H. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Indikator Kinerja Utama
 - 1. Target dan Capaian IKU
 - 2. Uraian dan Analisa Capaian IKU

B. Capaian Sasaran Strategis

1. Capaian Sasaran strategis sesuai Renstra dan Target
2. Tabel Realisasi Capaian Sasaran Strategis
3. Uraian dan Analisa Capaian Sasaran Strategis

C. Akuntabilitas Keuangan

1. Ringkasan realisasi APBD Tahun 2019
 - Belanja Langsung
 - Belanja Tidak Langsung

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Lampiran

1. IKU
2. Pernyataan Hasil Reviu
3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 bertanda tangan
4. Cascading/Pohon Kinerja
5. Capaian Kinerja Per Triwulan (1-4)
6. Capaian Kinerja Renstra (2018-2023)
7. Matrik Keselarasan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis (Renstra)

Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang berisiko, memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggung jawaban, perencanaan strategi merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategi instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategi, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

A. Visi RPJMD

Visi Kabupaten Tanah Laut yaitu :

***“MEWUJUDKAN TANAH LAUT YANG BERINTERAKSI
(BERkarya, INovasi, TERTata, Religius, Aktual, dan Sinergi)”***

B. Misi RPJMD

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas maka Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan Misi pembangunan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya;

2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif;
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan kehidupan masyarakat;
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Telaahan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut, yaitu: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut terkait dengan **Misi (1)** Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya; **Misi (2)** Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif; **Misi (3)** Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);

C. Tujuan sesuai Renstra

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam tahun 2018-2023. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Rencana Strategis adalah sebagai berikut:

1. **Misi 1** : Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
 - Tujuan** : 1. Terwujudnya penyebaran informasi di Kabupaten Tanah Laut
 - Sasaran** : 1.1 Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Tanah Laut
1.2 Meningkatnya pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi
1.3 Meningkatnya SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)

2. **Misi 2** : Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
 - Tujuan** : 2. Terwujudnya inovasi yang difasilitasi oleh Dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Tanah Laut
 - Sasaran** : 2.1 Meningkatnya fasilitasi layanan SKPD dalam pengembangan inovasi

3. **Misi 3** : Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
 - Tujuan** : 3.1 Terwujudnya SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
3.2 Terwujudnya pengembangan dan pengelolaan SPBE
3.3 Terwujudnya tata kelola administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan
3.4 Terwujudnya pengelolaan statistik yang akurat di Kabupaten Tanah Laut
 - Sasaran** : 3.1.1 Meningkatnya pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut
3.2.1 Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
: 3.2.2 Meningkatnya penggunaan domain resmi pemerintah Kabupaten Tanah Laut
: 3.3.1 Meningkatnya tata kelola administrasi

- umum dan kepegawaian
- : 3.3.2 Meningkatnya kualitas pelaporan dan perencanaan
- : 3.4.1 Meningkatnya kualitas data statistik sektoral SKPD

D. Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang telah dirumuskan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sebagaimana sasaran Renstra adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1 Formulir Sasaran Strategis

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|--|--------|
| 1 | Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Tanah Laut | Persentase informasi yang disebarakan | 100% |
| 2 | Meningkatnya pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi | Persentase KIM yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi | 100% |
| 3 | Meningkatnya SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi) | Persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi) | 27 % |
| 4 | Meningkatnya fasilitasi layanan SKPD dalam pengembangan inovasi | Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi | 100 % |
| 5 | Meningkatnya pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut | Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) | 2,0 |
| 6 | Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) | Persentase SKPD yang menerapkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) | 8,9% |
| 7 | Meningkatnya penggunaan domain resmi pemerintah Kabupaten Tanah Laut | Persentase kenaikan penggunaan domain tanahlautkab.go.id | 10 % |
| 8 | Meningkatnya tata kelola administrasi umum dan | Persentase tata kelola administrasi umum dan | 100 % |

| | | | |
|----|--|--------------------------------------|----------|
| | kepegawaian | kepegawaian tertib dan tepat waktu | |
| 9 | Meningkatnya kualitas pelaporan dan perencanaan | Nilai SAKIP SKPD | 78 nilai |
| 10 | Meningkatnya kualitas data statistik sektoral SKPD | Persentase statistik sektoral daerah | 80% |

E. Tabel (Tujuan, Indikator, Target, Sasaran, Indikator, Target 5 Tahun)

Tabel 2.2 Tujuan, indikator, target, sasaran, indikator, target 5 tahun

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Target Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target | | | | |
|----|--|--|---------------|---|--|--------|-------|------|------|------|
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Terwujudnya penyebaran informasi di Kabupaten Tanah Laut | Persentase peningkatan sebaran informasi dan komunikasi publik | 100% | 1.1 Meningkatkan penyebaran informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Tanah Laut | Persentase informasi yang disebarakan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | 100% | 1.2 Meningkatkan pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi | Persentase KIM yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi | 27 % | 27 % | 27 % | 27 % | 27 % |
| | | Persentase peningkatan SKPD terhadap keamanan informasi | 2,4 % | 1.3 Meningkatkan SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi) | Persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi) | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% |
| 2. | Terwujudnya inovasi yang difasilitasi oleh Dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Tanah Laut | Persentase inovasi yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika | 100 % | 2.1 Meningkatkan fasilitasi layanan SKPD dalam pengembangan inovasi | Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi | 100 % | 100 % | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Terwujudnya pengembangan dan pengelolaan SPBE | Persentase SKPD yang memiliki fasilitas (sumber daya) | 2,8 | 3.1 Meningkatkan pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis | Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|----------|--|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | penunjang SPBE | | Elektronik) | | | | | | |
| | | | 8,9% | 3.2 Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) | Persentase SKPD yang menerapkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) | 8,9% | 8,9% | 8,9% | 8,9% | 8,9% |
| | | | 10% | 3.3 Meningkatnya penggunaan domain resmi pemerintah Kabupaten Tanah Laut | Persentase kenaikan penggunaan domain tanahlautkab.go.id | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
| 4. | Terwujudnya tata kelola administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan | Persentase tata kelola administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan dengan baik | 100% | 3.4 Meningkatnya tata kelola administrasi umum dan kepegawaian | Persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | | 82 Nilai | 3.5 Meningkatnya kualitas pelaporan dan perencanaan | Nilai SAKIP SKPD | 78 nilai | 79 nilai | 80 nilai | 81 nilai | 82 nilai |
| 5. | Terwujudnya pengelolaan statistik yang akurat di Kabupaten Tanah Laut | Persentase data sektoral SKPD yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan | 80% | 3.6 Meningkatnya kualitas data statistik sektoral SKPD | Persentase statistik sektoral daerah | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |

F. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama yang telah dirumuskan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sebagaimana sasaran Renstra adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama

| No. | Sasaran Renstra | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan/ Formulasi Perhitungan | Penanggung Jawab/Sumber Data |
|-----|---|---|--------------------------------------|------------------------------|
| 1 | Meningkatnya pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut | 1 Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) | Hasil Penilaian SPBE dari Menpan RB | Dinas Kominfo |

G. Program dan Kegiatan

Dalam mendukung visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sebagaimana yang dijabarkan dalam Sasaran Strategis maka untuk mencapai sasaran tersebut memerlukan dukungan anggaran yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 1.014.144.059,60,-

- a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp. 41.400.000,-
- b) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor sebesar Rp.34.412.297,60
- c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional sebesar Rp. 57.645.000,-
- d) Penyediaan jasa administrasi keuangan sebesar Rp. 13.505.100,-
- e) Penyediaan jasa kebersihan kantor sebesar Rp 4.136.500,-
- f) Penyediaan alat tulis kantor sebesar Rp. 12.382.920,-
- g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebesar Rp. 6.492.500,-
- h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebesar Rp. 61.901.100,-
- i) Penyediaan makanan dan minuman sebesar Rp. 19.684.000,-
- j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah sebesar Rp. 311.771.250,-
- k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah sebesar Rp. 91.410.000,-
- l) Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD sebesar Rp. 344.999.392,-

- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 294.450.000,-**
 - a) Pengadaan Kendaraan dinas/operasional sebesar Rp. 294.450.000,-
- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar Rp. 45.000.000,-**
 - a) Pendidikan dan Pelatihan Formal sebesar Rp. 45.000.000,-
- 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp. 2.551.900,-**
 - a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebesar Rp. 2.551.900,-
- 5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa sebesar Rp. 1.831.628.100,-**
 - a) Kegiatan Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi sebesar Rp. 1.163.000.000,-
 - b) Kegiatan Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi sebesar Rp. 598.898.100,-
 - c) Kegiatan penyusunan aplikasi sistem informasi sebesar Rp. 69.730.000,-
- 6. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media sebesar Rp. 172.809.800,-**
 - a) Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat Rp. 172.809.800,-
- 7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Kominfo sebesar Rp. 44.787.500,-**
 - a) Kegiatan pemeliharaan menara repeater bidang kominfo Rp. 44.787.500,-
- 8. Program Pengembangan Data/Informasi Rp. 28.054.100,-**
 - a) Penyusunan profile daerah Rp. 28.054.100,-
- 9. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah sebesar Rp. 4.500.000,-**
 - a) Penyusunan tabulasi data asset tetap Rp. 4.500.000,-

G. Perjanjian Kinerja 2019

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang

berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 yang telah disepakati baik oleh Kepala Dinas, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV, adalah sebagai berikut :

**Perjanjian/Penetapan Kinerja SKPD Tahun 2019
(Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut)**

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Meningkatnya pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut | Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) | 2.00 |

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media
2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan dan Fasilitasi Kominfo
3. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media
4. Program Pengembangan Data/Informasi
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
8. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
9. Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset daerah

Perjanjian/Penetapan Kinerja Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019

| No. | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|------------|---|--|---------------|
| 1. | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Meningkatnya tata kelola administrasi umum dan kepegawaian | 1. Persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu | 100 % |
| 2. | Meningkatnya fasilitasi layanan SKPD dalam pengembangan inovasi | 2. Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi | 100 % |
| 3. | Meningkatnya kualitas pelaporan dan perencanaan | 3. Nilai SAKIP SKPD | 78 |

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah

Perjanjian/Penetapan Kinerja Kabid Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019

| No. | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|------------|---|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Tanah Laut | Persentase informasi yang disebarakan | 100% |
| 2. | Meningkatnya pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi | Persentase KIM yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi | 27% |

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
2. Program Rehabilitasi dan Prasarana dan Fasilitas Kominfo
3. Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media

**Perjanjian/Penetapan Kinerja Kabid Penyelenggaraan
E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019**

| No | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|--|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut | Persentase SKPD yang menerapkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) | 8,9 % |
| 2. | Meningkatnya penggunaan domain resmi pemerintah Kabupaten Tanah Laut | Persentase kenaikan penggunaan domain tanahlautkab.go.id | 10 % |

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

**Perjanjian/Penetapan Kinerja Kabid Statistik dan Persandian
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2019**

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|--|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi) | Persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi) | 5 % |
| 2. | Meningkatnya kualitas data statistik sektoral | Persentase statistik sektoral daerah | 80 % |

1. Program Pengembangan Data/Informasi

**Perjanjian/Penetapan Kinerja Kasubbag Umum dan
Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019**

| No. | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|--|---|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta aset daerah | Jumlah administrasi umum dan kepegawaian yang terpenuhi | 65 berkas |
| | | Jumlah kepesertaan untuk pendidikan dan pelatihan formal. | 9 orang |
| | | Jumlah laporan pengelolaan aset daerah. | 2 laporan |
| 2. | Melaksanakan fasilitasi dalam pengembangan inovasi | Jumlah permohonan fasilitasi pengembangan inovasi | 3 SKPD |

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - 2 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional
 - 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - 5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - 6 Penyediaan alat tulis kantor
 - 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - 8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - 9 Penyediaan makanan dan minuman
 - 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah
 - 12 Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah

Perjanjian/Penetapan Kinerja Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Melaksanakan pengelolaan perencanaan dan keuangan serta pelaporan kinerja dinas | Jumlah dokumen perencanaan dinas | 3 dokumen |
| | | Jumlah dokumen pelaporan kinerja dinas | 4 dokumen |
| | | Jumlah dokumen laporan keuangan dinas. | 32 dokumen |

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 1 Penyediaan jasa administrasi keuangan
- 2. Program Peningkatan
 - 2 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

**Perjanjian/Penetapan Kinerja Kasi Pengelolaan Saluran
Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019**

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Melaksanakan pengelolaan layanan komunikasi publik | Jumlah data layanan jaringan komunikasi publik | 2 dokumen |
| | | Jumlah permohonan rekomendasi pendirian menara telekomunikasi di Kabupaten Tanah Laut yang terpenuhi | 10 permohonan |

- 1 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan dan Fasilitasi Kominfo 1 Kegiatan pemeliharaan menara repeater bidang kominfo

**Perjanjian/Penetapan Kinerja Kasi Kemitraan, Penyiaran dan
Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019**

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Melaksanakan pengelolaan kemitraan, penyiaran dan informasi publik | Jumlah data informasi publik yang diinformasikan melalui website ppid | 30 data |
| | | Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi | 3 KIM |
| | | Jumlah informasi pembangunan kabupaten yang disebarluaskan melalui media massa daerah | 240 informasi/berita |

- 1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1 Kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
- 2 Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media 2 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

**Perjanjian/Penetapan Kinerja Kasi Infrastruktur dan Teknologi
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2019**

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----------|--|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Memfasilitasi dan memberikan layanan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang SPBE di Kabupaten Tanah Laut | Jumlah sarana dan prasarana TIK penunjang SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) | 1 unit |
| | | Jumlah SKPD yang menggunakan jaringan E-government | 4 SKPD |
| | | Jumlah permohonan rekomendasi SKPD terkait pengelolaan tata kelola TIK yang terpenuhi | 2 permohonan |

- 1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1 Kegiatan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

**Perjanjian/Penetapan Kinerja Kasi Pengembangan Aplikasi
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2019**

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----------|---|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Memfasilitasi dan memberikan layanan untuk pengembangan dan pengelolaan aplikasi penunjang SPBE di Kabupaten Tanah Laut | Jumlah permohonan penggunaan domain tanahloutkab.go.id | 2 SKPD |
| | | Jumlah pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan aplikasi penunjang SPBE | 2 aplikasi |
| | | Jumlah SKPD yang mendapatkan pembinaan dan sosialisasi tentang pengelolaan aplikasi daerah | 20 SKPD |

- 1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1 Penyusunan aplikasi sistem informasi

**Perjanjian/Penetapan Kinerja Kasi Pengelolaan Statistik
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2019**

| No. | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|------------|---|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Melaksanakan Sosialisasi dan Pelatihan Pengisian Indikator pada Aplikasi Satu Data Tanah Laut | Jumlah Aplikasi Satu Data yang memadai | 1 aplikasi |
| | | Jumlah Buku Data Statistik Sektoral | 1 buku |
| | | Jumlah Admin Satu Data SKPD yang mampu dalam pengisian Indikator/Elemen Aplikasi Satu Data Tanah Laut | 20 orang |

- 1 Program Pengembangan 1 Kegiatan penyusunan profile Data/Informasi daerah

Perjanjian/Penetapan Kinerja Kasi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----------|---|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan persandian, keamanan informasi | Jumlah SKPD yang paham tentang pengelolaan persandian dan pengamanan informasi | 1 SKPD |
| | | Jumlah SKPD yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi | 2 SKPD |
| | | Jumlah sosialisasi persandian dan keamanan informasi | 1 kali |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2019 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2019. Selain itu, realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja Tahun 2019.

A. Capaian Indikator Kinerja Utama

1. Target dan Capaian IKU

Indikator Kinerja Utama akan dapat memberikan gambaran suatu ukuran keberhasilan Instansi Pemerintah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 yang telah dilakukan perbaikan atas hasil evaluasi, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut (IKU) Tahun 2019

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET | CAPAIAN |
|-----------|---|---|---------------|----------------|
| 1. | Meningkatnya pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut | Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) | 2.0 | 2,76 |

2. Uraian dan Analisa Capaian IKU

Berdasarkan tabel 3.1 mengenai target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019, maka dapat dibuat tabel 3.2 mengenai Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 dan 2019 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 dan 2019

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | 2018 | | 2019 | | Ket |
|----|---|-------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | |
| 1. | Meningkatnya pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut | Indeks SPBE | 1,8 | 1,42 | 2,0 | 2,76 | Indeks |

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam Perjanjian Kinerja (PK) hanya terdiri dari 1 (satu) kinerja utama, yaitu indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Sasaran Tahun 2019

| NO | INDIKATOR KINERJA | REALISASI | TAHUN 2019 | | |
|----|---|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | 2018 | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN |
| 1 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 1,42 | 2,0 | 2.76 | 138 |

Gambar Nilai Indeks SPBE, Domain dan Aspek

http://spbe.go.id/moneval/de



Cari dan Tek



NILAI INDEKS SPBE, DOMAIN DAN ASPEK

Nilai Indeks SPBE, Domain dan Aspek

- Aspek SPBE Target
- Aspek SPBE Indeks



Nama Instansi

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

K/L/D : Kabupaten
Daerah : Kalimantan
Selatan

Indeks SPBE : 2.76

Predikat SPBE : Baik

Domain Kebijakan SPBE : 3.18

➔ Kebijakan Tata Kelola SPBE : 3.14

➔ Kebijakan Layanan SPBE : 3.2

Domain Tata Kelola : 2.29

➔ Kelembagaan : 2.00

➔ Strategi dan Perencanaan : 2.00

➔ TIK : 2.67

Domain Layanan SPBE : 2.88

➔ Administrasi : 3.00

Pemerintahan

➔ Pelayanan Publik : 2.67

a. Perbandingan Realisasi Dengan Target

Secara garis besar kinerja pelayanan SKPD didasarkan pada kualitas layanan e-Government, yang diukur keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Utama indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Tanah Laut.

Dasar hukum SPBE adalah Peraturan Presiden RI Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE merupakan suatu sistem untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan yang berkualitas dan terpercaya. SPBE memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

Penilaian SPBE tahun tahun 2019 dilakukan oleh tim yang ditunjuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), dengan jumlah Tim:

1. Koordinator : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Anggota : - Universitas Indonesia (Jakarta)
- Universitas Gajah Mada (Yogyakarta)
- Universitas Gunadharma (Jakarta)
- Politeknik Elektronika (Surabaya)
- Universitas Telkom (Bandung)

Hasil evaluasi SPBE Tahun 2019 dinilai berdasarkan Evaluasi Mandiri yang dilakukan oleh Evaluator Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Evaluasi Dokumen yang dilakukan oleh Evaluator Eksternal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Nilai SPBE Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tahun 2019 adalah sebesar 2,76 yang berarti telah melebihi target yang ditetapkan (2,0), dengan realisasi mencapai 138%. Nilai indeks 2,76 masuk dalam predikat baik (2,6–3,5). Tabel berikut memperlihatkan kategori nilai SPBE.

Tabel 3.4 Kategori SPBE

| NO | NILAI SPBE | PRIDIKAT |
|----|------------|-------------|
| 1 | 4,2 – 5,0 | Memuaskan |
| 2 | 3,5 – <4,2 | Sangat Baik |
| 3 | 2,6 – <3,5 | Baik |
| 4 | 1,8 – <2,6 | Cukup |

Penilaian SPBE didasarkan atas domain dan aspek penilaian, yang dirincikan sebagai tabel berikut.

Tabel 3.5 Domain dan Aspek Penilaian

| No | DOMAIN | ASPEK PENILAIAN | BOBOT |
|----|------------------|---|-------|
| 1 | Kebijakan SPBE | - Kebijakan Tata Kelola SPBE | 7% |
| | | - Kebijakan Layanan SPBE | 10% |
| 2 | Tata Kelola SPBE | - Kelembagaan | 8% |
| | | - Strategi dan Perencanaan | 8% |
| | | - Teknologi Informasi dan Komunikasi | 12% |
| 3 | Layanan SPBE | - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik | 33% |
| | | - Layanan Publik Berbasis Elektronik | 22% |

b. Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait

Perbandingan SPBE hanya dapat dilakukan untuk tahun 2018 dan 2019 saja, sedangkan tahun 2017 masih belum ada. Indeks SPBE tahun 2019 (2.76) lebih tinggi dari tahun 2018

(1,42), atau meningkat 1,34. Peningkatan cukup signifikan, dan dapat diartikan juga bahwa terjadi peningkatan dalam hal tata kelola kelembagaan, strategi dan perencanaan, teknologi informasi dan komunikasi, serta layanan administrasi pemerintahan dan publik berbasis elektronik. Untuk tahun 2020 diharapkan dapat lebih meningkat lagi.

c. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

SPBE Kabupaten Tanah Laut dengan Nilai 2.76 bila dibandingkan tahun 2018 (1,42) meningkat 1,34. Peningkatan ini didapat dari hasil kerja sama dan kerja keras seluruh unit-unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut. Berbagai upaya yang dilakukan, melalui pengembangan inovasi teknologi dan informatika, sosialisasi, integrasi berbagai aplikasi, penyediaan/fasilitasi sarana/prasarana komunikasi/informasi, peningkatan layanan publik, peningkatan SDM aparatur, dan lain-lain.

Hal yang paling penting tercapainya target dan peningkatan SPBE adalah komitmen pimpinan (Bupati) yang sangat tinggi, sehingga memacu SKPD lain untuk lebih serius dan aktif mengimplementasikan SPBE. Akibatnya koordinasi dan kerjasama dapat terjalin dengan baik antar SKPD.

Selanjutnya untuk dapat lebih meningkatkan SPBE ini di tahun mendatang, beberapa hal rekomendasi di bawah ini agar dapat dilakukan, yaitu:

1. Kebijakan internal Tim Pengarah SPBE

Kebijakan internal tim pengarah SPBE atau Tim Pengarah TIK atau sejenisnya sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan tugas-tugas yang mendukung penerapan SPBE yang terpadu di dalam instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan antar instansi pusat/Pemerintah Daerah

2. Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi

Kebijakan internal proses bisnis sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan tersusunnya proses bisnis yang terintegrasi antar unit kerja/perangkat daerah di instansi Pusat/pemerintah Daerah.

3. Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE

Kebijakan internal rencana induk SPBE sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan tersusunnya rencana induk, yang mencakup penerapan SPBE yang terpadu, tidak hanya didalam instansi pusat/pemerintah daerah, tetapi juga antar instansi pusat/pemerintah daerah dan/atau antar instansi pusat dengan pemerintah daerah.

4. Kebijakan Internal Anggaran Belanja TIK

Kebijakan internal rencana anggaran TIK sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan terkait penyelarasan dengan rencana induk SPBE.

5. Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data

Kebijakan internal pengoperasian pusat data sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan pengoperasian dan pemanfaatan pusat data, bagi semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/pemerintah daerah

6. Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi

Kebijakan internal integrasi sistem aplikasi sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan integrasi sistem aplikasi, yang didasarkan pada integrasi proses bisnis antar unit kerja/perangkat daerah di instansi pusat/pemerintah daerah

7. Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai

Kebijakan internal penggunaan aplikasi umum berbagi pakai, sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan penggunaannya di semua unit kerja/perangkat daerah di instansi pusat/pemerintah daerah.

8. Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinas

Kebijakan internal layanan naskah dinas, sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan integrasi layanan naskah dinas, secara elektronik dengan layanan SPBE lain, yang sudah tersedia di instansi pusat/pemerintah daerah, atau integrasi layanan secara elektronik antar instansi pusat/pemerintah daerah dan/atau antar pusat dengan pemerintah daerah.

9. Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian

Kebijakan internal layanan manajemen kepegawaian, sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan integrasi layanan manajemen kepegawaian secara elektronik, dengan layanan SPBE lain yang sudah tersedia di instansi pusat/pemerintah Daerah, atau integrasi layanan manajemen kepegawaian secara elektronik antar instansi pusat/pemerintah daerah dan/atau antar instansi pusat dengan pemerintah daerah.

10. Kebijakan internal layanan manajemen perencanaan dan penganggaran

Kebijakan internal layanan manajemen perencanaan dan penganggaran, sebaiknya dinilai dan dievaluasi secara berkala, terhadap perubahan-perubahan di internal dan eksternal di instansi pusat/pemerintah daerah, serta menerapkan manajemen perubahan.

11. Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan

Kebijakan internal layanan manajemen keuangan, sebaiknya dinilai dan dievaluasi secara berkala, terhadap perubahan-perubahan di internal dan eksternal di instansi

pusat/pemerintah daerah, serta menerapkan manajemen perubahan.

12. Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja

Kebijakan internal layanan manajemen kinerja, sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan integrasi layanan-layanan manajemen kinerja secara elektronik, dengan layanan SPBE lain yang sudah tersedia di instansi pusat/pemerintah daerah, atau integrasi layanan manajemen kinerja secara elektronik antar instansi pusat/pemerintah daerah dan/atau antar instansi pusat dengan pemerintah daerah.

13. Kebijakan Internal Layanan Pengadaan

Kebijakan internal layanan pengadaan, sebaiknya dinilai dan dievaluasi secara berkala, terhadap perubahan-perubahan di internal dan eksternal di instansi pusat/pemerintah daerah, serta menerapkan manajemen perubahan.

14. Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik

Kebijakan internal layanan pengaduan publik, sebaiknya dinilai dan dievaluasi secara berkala, terhadap perubahan-perubahan di internal dan eksternal di instansi pusa/pemerintah daerah, serta menerapkan manajemen perubahan.

15. Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi Dan Hukum

Kebijakan internal layanan dokumentasi dan hukum, sebaiknya dinilai dan dievaluasi secara berkala, terhadap perubahan-perubahan di internal dan eksternal di instansi pusa/pemerintah daerah, serta menerapkan manajemen perubahan.

16. Kebijakan Internal Layanan Whistle Blowing System (WBS)

Kebijakan internal layanan Whistle Blowing System (WBS), sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan kebutuhan, dan penggunaan layanan WBS secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di instansi pusat/pemerintah daerah.

17. Kebijakan Internal Layanan Publik Instansi Pemerintah

Kebijakan internal layanan publik instansi pemerintah, sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan integrasi layanan secara elektronik, dengan layanan SPBE lain yang sudah tersedia di instansi pusat/pemerintah daerah, atau integrasi layanan publik secara elektronik antar instansi pusat/pemerintah daerah dan/atau antar pusat dengan pemerintah daerah.

18. Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah

Kinerja tim pengarah SPBE dalam menjalankan tugas, dan fungsinya sebaiknya diukur, dinilai, dan di evaluasi secara kuantitatif dan berkala.

19. Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi

Inovasi proses bisnis terintegrasi, dengan sistem elektronik sebaiknya dapat diukur, dipantau, dan evaluasi secara berkala.

20. Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah

Peta rencana dari rencana induk SPBE, sebaiknya dimutakhirkan secara berkala, berdasarkan hasil pengukuran, pemantauan dan evaluasi.

21. Anggaran Belanja Teknologi Informasi Komunikasi

Perencanaan dan penganggaran TIK, sebaiknya tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan, secara terpadu sebaiknya dapat dikendalikan oleh unit kerja/perangkat daerah, yang berfungsi sebagai pengelola

TIK, dan dapat diukur, dipantau dan dievaluasi secara berkala.

22. Pengoperasian Pusat Data

Perencanaan kapasitas, pengendalian, dan pemantauan layanan dari satu atau beberapa pusat data (data center) sebaiknya dapat dilakukan secara berkala dan terpusat (manajemen tunggal).

23. Integrasi Sistem Aplikasi

Integrasi sistem aplikasi, sebaiknya dapat ditingkatkan kualitasnya secara berkesinambungan, berdasarkan hasil pengukuran, pemantauan dan evaluasi serta penerapan manajemen perubahan.

24. Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai

Aplikasi umum sebaiknya, diterapkan dan digunakan oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah, di instansi pusat/pemerintah daerah berdasarkan arsitektur dan peta rencana dari rencana induk SPBE.

25. Layanan Naskah Dinas

Layanan Naskah Dinas, elektronik sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi, dimana proses-proses pada penggunaan naskah dinas elektronik dilaksanakan secara otomatis, seperti mengunggah e-dokument dan memasukkan informasi ke dalam sistem, serta sistem dapat merespon kepada pengguna terhadap mekanisme persetujuan, penyematan tanda digital dan pengiriman naskah dinas elektronik ke tujuan penerima di internal instansi pusat/pemerintah daerah.

26. Layanan Manajemen Kepegawaian

Layanan manajemen kepegawaian, sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi, dimana layanan tersebut dikolaborasikan/diintegrasikan dengan layanan

SPBE lain, berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam maupun antar instansi pusat/pemerintah daerah.

27. Layanan Manajemen Perencanaan

Layanan manajemen perencanaan, kegiatan yang terintegrasi sebaiknya ditingkatkan, menjadi layanan optimalisasi dimana dapat melakukan pemenuhan permintaan perubahan layanan, penyesuaian terhadap perubahan-perubahan internal dan eksternal di instansi pusat/pemerintah daerah, dan penerapan manajemen perubahan.

28. Layanan Manajemen Penganggaran

Layanan manajemen penganggaran, sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi, dimana layanan tersebut dikolaborasikan/diintegrasikan dengan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam maupun antar instansi pusat/pemerintah daerah.

29. Layanan Manajemen Keuangan

Layanan Manajemen Keuangan, yang terintegrasi sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan optimalisasi dimana dapat melakukan pemenuhan permintaan perubahan layanan, penyesuaian terhadap perubahan-perubahan internal dan eksternal di Instansi pusat/pemerintah daerah, dan penerapan manajemen perubahan.

30. Layanan Manajemen Kinerja

Layanan manajemen Kinerja, yang terintegrasi sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan optimalisasi, dimana dapat melakukan pemenuhan permintaan perubahan layanan, penyesuaian terhadap perubahan-perubahan

internal dan eksternal di instansi pusat/pemerintah daerah, dan penerapan manajemen perubahan.

31. Layanan pengadaan

Layanan pengadaan, yang terintegrasi sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan optimalisasi dimana dapat melakukan pemenuhan permintaan perubahan layanan, penyesuaian terhadap perubahan-perubahan internal dan eksternal di instansi pusat/pemerintah daerah, dan manajemen perubahan.

32. Layanan pengaduan publik

Layanan pengaduan publik, ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasikan/integrasikan dengan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam maupun antar instansi pusat/pemerintah daerah.

33. Layanan Dokumentasi dan informasi dan informasi hukum

Layanan Dokumentasi dan informasi dan informasi hukum (JDIH), sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana proses-proses pada layanan dokumentasi dan informasi hukum dilaksanakan secara otomatis seperti mengunduh atau mengunggah informasi terkait dokumentasi dan informasi hukum, melakukan pengajuan penambahan informasi dokumentasi hukum baru, proses validasi serta persetujuan dokumentasi informasi hukum baru yang diajukan, dan pencarian informasi hukum berbasis kecerdasan.

34. Layanan Whistle-Blowing System

Layanan Whistle-Blowing System (WBS), sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi, dimana layanan tersebut dikolaborasikan/diintegrasikan dengan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses

bisnis di dalam maupun antar instansi pusat/pemerintah daerah.

35. Pelayanan publik

Layanan publik, sebaiknya ditingkaykan menjadi layanan kolaborasi, dimana layanan tersebut dikolaborasikan/diintegrasikan dengan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPBNE dan integrasi proses bisnis di dalam maupun antar instansi pusat/pemerintah daerah.

Layanan publik, sebaiknya ditingkaykan menjadi layanan kolaborasi, dimana layanan tersebut dikolaborasikan/diintegrasikan dengan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPBNE dan integrasi proses bisnis di dalam maupun antar instansi pusat/pemerintah daerah.

Layanan publik, sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi, dimana pengguna dapat dengan mudah mendapatkan layanan dan sistem dapat menjalankan otomatisasi proses bisnis layanan dan menerapkan transaksi layanan ke dalam basis data secara daring (on-line).

B. Capaian Sasaran Strategis

1. Capaian Sasaran Strategis sesuai Renstra dan Target

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Renstra yang telah dibuat untuk tahun 2018-2023 telah menetapkan beberapa sasaran strategis. LAPKIN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut untuk tahun anggaran 2019 adalah Laporan Kinerja Dinas yang merupakan tahun ke dua dari pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut. Sesuai dengan keadaan, Renstra dibuat untuk setiap sasaran dapat lebih dari satu indikator kinerja sasaran dimana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut telah

menetapkan indikator kinerja yang akan dapat mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tahun 2019 sesuai sasaran strategis yang akan diketahui keberadaannya.

Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dengan menetapkan kategori pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 3.6 Pengelompokan Capaian Kinerja

| Urutan | Rentang Capaian | Kategori Capaian |
|--------|-----------------|------------------|
| I | > 90 % | Sangat Memuaskan |
| II | 81% - 90% | Memuaskan |
| III | 71 % - 80 % | Sangat Baik |
| IV | 61 % - 70 % | Baik |
| V | 51 % - 60 % | Cukup |
| VI | < 50 % | Kurang |

2. Tabel Realisasi Capaian Sasaran Strategis

Tabel 3.7 Realisasi Capaian Sasaran Strategis Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | CAPAIAN | KET |
|-----|-------------------|-------------------|--------|---------|-----|
|-----|-------------------|-------------------|--------|---------|-----|

| | | | | | |
|----|---|---|-------|-------|---------------|
| 1 | Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Tanah Laut | Persentase informasi yang disebarakan | 100% | 100% | |
| 2 | Meningkatnya pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi | Persentase KIM yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi | 27% | 27% | |
| 3 | Meningkatnya SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi) | Persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi) | 2,4 % | 2,4% | |
| 4 | Meningkatnya fasilitasi layanan SKPD dalam pengembangan inovasi | Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi | 100 % | 100 % | |
| 5 | Meningkatnya pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut | Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) | 2,0 | 2,76 | Kategori Baik |
| 6 | Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) | Persentase SKPD yang menerapkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) | 8,9% | 8,9% | |
| 7 | Meningkatnya penggunaan domain resmi pemerintah Kabupaten Tanah Laut | Persentase kenaikan penggunaan domain tanahlautkab.go.id | 10 % | 10% | |
| 8 | Meningkatnya tata kelola administrasi umum dan kepegawaian | Persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu | 100 | 94% | |
| 9 | Meningkatnya kualitas pelaporan dan perencanaan | Nilai SAKIP SKPD | 78 | 71,18 | Kategori BB |
| 10 | Meningkatnya kualitas data statistik sektoral SKPD | Persentase statistik sektoral daerah | 80% | 80% | |

3. Uraian dan Analisa Capaian Sasaran Strategis

3.1 Hasil capaian realisasi sasaran 1.1 dan 1.2 pada Bidang Komunikasi

Tabel 3.8 Hasil capaian realisasi sasaran 1.1 dan 1.2

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKTOR KINERJA | TARGET | REALISASI | PERSENTASE CAPAIAN | TARGET AKHIR RENSTRA |
|-------------------|---|--|--------|-----------|--------------------|----------------------|
| 1 | 1.1 Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Tanah Laut | Persentase informasi yang disebarakan | 100% | 100% | 100% | |
| 2 | 1.2 Meningkatnya pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi | Persentase KIM yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi | 27% | 27% | 100% | |
| Rata-Rata Capaian | | | | | 100% | |

Selanjutnya tabel berikut menyajikan perbandingan kinerja tahun 2019 dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.9 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023

| NO | INDIKATOR KINERJA | REALISASI | TAHUN 2019 | | |
|-------------------|--|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | 2018 | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN |
| 1. | Persentase informasi yang disebarakan | 100% | 100% | 100% | 100 |
| 2. | Persentase KIM yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi | N/A | 27% | 27% | 100 |
| Rata-rata Capaian | | | | | 100 |

a) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Rata-rata Capaian Kinerja bidang pengelolaan komunikasi telah terealisasi 100%. Dari 2 indikator kinerja, indikator persentase informasi yang disebarakan telah tercapai 100% dari target 100% tahun 2019. Untuk 1 indikator lainnya juga telah tercapai 27% dari target tahun 2019 (27%).

b) Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait

Perbandingan target tahun 2019 dengan tahun 2018 yang terdiri dari indikator persentase informasi yang telah disebarakan telah tercapai 100% pada tahun 2019 dan juga tahun 2018 sebelumnya. Sedangkan pada indikator Persentase KIM yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi juga telah terealisasi 27% dengan target 27% sehingga tercapai 100%.

c) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

- Persentase Informasi yang Disebarakan

Persentase informasi yang disebarakan oleh Bidang komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut di tahun 2019 dicapai angka 100% dari target capaian 100%. Capaian tersebut diperoleh dari jumlah informasi yang disebarakan sebanyak 270 data/informasi dibagi data informasi yang harus disebarakan sebanyak 270 data/informasi target dalam setahun pelaksanaan kegiatan. Capaian 270 data/informasi tersebut terdiri atas Jumlah data informasi publik yang diinformasikan melalui website ppid sebanyak 30 data dan Jumlah informasi pembangunan kabupaten yang disebarluaskan melalui media massa daerah sebanyak 240 informasi/berita. Adapun kegiatan yang berkaitan dengan penyebaran informasi tersebut dalam bentuk informasi/berita yang sebarakan baik melalui Radio Tuntung Pandang FM, media cetak (majalah, brosur, leaflet)

maupun media online (radio online, website, media sosial) serta melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang aktif dalam pengelolaan informasi, yang semuanya telah dilaksanakan pada tahun berkenaan, namun dalam hal penyebaran informasi tersebut harus dilakukan melalui proses analisa dan identifikasi serta klasifikasi atas informasi/berita yang akan disebarkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut terlebih dahulu, dengan tujuan menjaga kebenaran dan akurasi data/informasi tersebut. Seluruh pencapaian atas target indikator ini tercapai atas kerja keras dan kerjasama seluruh pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mendukung telaksananya Keterbukaan informasi publik di Kabupaten Tanah Laut.

d) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

1. Pengelolaan Website PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
2. Forum konsultasi publik melalui siaran radio pada program dialog interaktif Tanah Laut Menyapa dengan menghadirkan narasumber dari SKPD dilingkup pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
3. Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) melalui pelatihan pembuatan media publikasi berupa blogspot, dan pelatihan tatacara penulisan berita dan pengambilan foto untuk konten publikasi.
4. Penyebarluasan informasi melalui media sosial fanpage Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, media cetak berupa majalah interaksi, siaran Info Tanah Laut, portal berita daerah dan newsvideo di alamat website resmi pemerintah kabupaten tanah laut www.tanahlautkab.go.id.

e) Analisis Realisasi Anggaran Program

Pelaksanaan program kegiatan Bidang Komunikasi hampir terlaksana secara keseluruhan pada dua buah program, yaitu program kerjasama informasi dengan mas media dengan realisasi anggaran sebesar Rp 143.889.790,- dari pagu program Rp 172.809.800,- dengan persentase capaian 83,26 % dan pada program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas Kominfo terjadi penurunan akibat adanya kegiatan yang tidak terlaksana dengan realisasi anggaran Rp 4.260.197,- dari pagu Rp 44.787.500,- yang capaian realisasinya hanya 9,51 %.

3.1.1 Kepala Seksi Kemitraan, Penyiaran dan Informasi Publik

Tabel berikut di bawah ini memperlihatkan target dan realisasi indikator kinerja Kepala Seksi Kemitraan, Penyiaran dan Informasi Publik tahun 2019.

Tabel 3.10 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

| NO | SASARAN STRATEGIS | KINERJA UTAMA | TARGET | REALISASI | PERSENTASE CAPAIAN | TARGET AKHIR RENSTRA |
|----|--|---|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Melaksanakan pengelolaan kemitraan, penyiaran dan informasi publik | Jumlah data informasi publik yang diinformasikan melalui website ppid | 30 data | 30 data | 100 | 90 data |
| | | Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang terbantu dan memanfaatkan teknologi informasi | 3 KIM | 4 KIM | 133 | 15 KIM |
| | | Jumlah informasi pembangunan kabupaten yang disebarluaskan melalui | 240 informasi/berita | 240 informasi/berita | 100 | 1200 informasi/berita |

| | | | | | | |
|-------------------|--|--------------------|--|--|-----|--|
| | | media massa daerah | | | | |
| Rata-Rata Capaian | | | | | 111 | |

a) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Rata-rata capaian kinerja Seksi Kemitraan, Penyiaran dan Informasi Publik dalam Kegiatan pengelolaan kemitraan, penyiaran dan informasi publik terealisasi 111%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh Kinerja Utama kegiatan pengelolaan kemitraan, penyiaran dan Informasi Publik telah terlaksana dengan hasil yang diperoleh melebihi target yang ditetapkan.

b) Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait

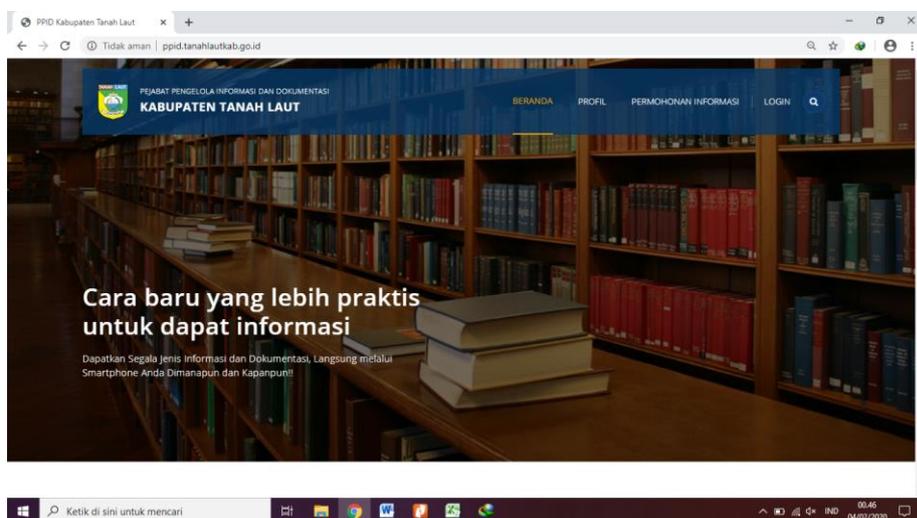
Perbandingan pencapaian kinerja tahun 2018 (100%) dan tahun 2019 (111%), hal ini menunjukkan adanya hasil keluaran yang dicapai melampaui target.

c) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

- Jumlah data informasi publik yang diinformasikan melalui website ppid

Terealisasi sebanyak 30 data informasi dengan target 30 data informasi, yang berarti terealisasi 100%. Data yang disampaikan melalui website PPID (<http://ppid.tanahlautkab.go.id/>) dimana data tersebut langsung bersumber dari masing-masing PPID-Pembantu di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sehingga data tersebut dapat dipertanggungjawabkan akurasinya. Namun dalam pengelolaannya juga terdapat kendala yakni belum semua SKPD memahami akan pentingnya melakukan update data/informasi pada website PPID ini dalam

rangka menunjang keterbukaan informasi publik. Untuk kedepannya akan diambil langkah monitoring dan evaluasi yang akan dilakukan oleh Kepala Daerah.



Gambar tampilan awal website PPID Kabupaten Tanah Laut

Adapun 30 data tersebut antara lain:

1. Data Jumlah PAD di kabupaten Tanah Laut Tahun 2018
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANAH LAUT tanggal 19 Juli 2019.
2. DAFTAR APLIKASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANAH LAUT tanggal 22 Agustus 2019
3. DAFTAR WEBSITE
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANAH LAUT tanggal 22 Agustus 2019
4. SOP LAPOR TALA 2019
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANAH LAUT tanggal 22 Agustus 2019
5. DAFTAR KEPEGAWAIAN DISKOMINFO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANAH LAUT tanggal 22 Agustus 2019
6. SUSUNAN ORGANISASI & TATA KERJA
DISKOMINFO TAHUN 2019
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANAH LAUT tanggal 22 Agustus 2019

7. Laporan Hasil Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) INSPEKTORAT Kabupaten Tanah Laut tanggal 05 September 2019
8. DATA ORMAS/LSM PER KECAMATAN TAHUN 2019 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT tanggal 01 Oktober 2019
9. Buletin PPPA Edisi September 2019 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TANAH LAUT tanggal 03 Oktober 2019
10. Alat Kelengkapan DPRD Komisi Komisi Kabupaten Tanah Laut SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT tanggal 11 Oktober 2019
11. Alat Kelengkapan DPRD Komisi Komisi Kabupaten Tanah Laut SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT tanggal 12 Oktober 2019
12. DAFTAR NAMA PENERIMA INSENTIF DAERAH DISDIKBUD TALA (GURU BANTU BHAKTI) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANAH LAUT tanggal 15 Oktober 2019
13. DAFTAR NAMA PENERIMA INSENTIF DAERAH DISDIKBUD TALA (KATEGORI 2) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANAH LAUT tanggal 15 Oktober 2019
14. DAFTAR NAMA PENERIMA INSENTIF DAERAH DISDIKBUD TALA (KONDISI KHUSUS) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANAH LAUT tanggal 15 Oktober 2019
15. DAFTAR NAMA PENERIMA INSENTIF DAERAH DISDIKBUD TALA (NON KATEGORI 2) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANAH LAUT tanggal 15 Oktober 2019
16. DAFTAR NAMA PENERIMA INSENTIF DAERAH DISDIKBUD TALA (OPS) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANAH LAUT tanggal 15 Oktober 2019

17. DAFTAR NAMA PENERIMA INSENTIF DAERAH DISDIKBUD TALA (PAUD)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH LAUT tanggal 15 Oktober 2019
18. SURAT PEMBERKASAN TPG 2019 SEMESTER 2
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH LAUT tanggal 22 Oktober 2019
19. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Kesehatan 2018
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT
tanggal 23 Oktober 2019
20. Validasi dan Verifikasi aset disdikbud pada TK dan PAUD sekab. Tanah Laut (DISDIKBUD)
Validasi dan Verifikasi aset disdikbud pada TK dan PAUD
sekabupaten Tanah Laut
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH LAUT tanggal 25 Oktober 2019
21. Ringkasan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT tanggal 29
Oktober 2019
22. Surat Keputusan Penetapan Status Darurat Karhutla Tahun 2019
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT tanggal 29 Oktober 2019
23. RPJMD 2018-2023 Kabupaten Tanah Laut
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANAH LAUT tanggal 03 November
2019
24. DAFTAR NAMA PENERIMA INSENTIF DAERAH DISDIKBUD TALA (PAUD)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH LAUT tanggal 04 Desember
2019
25. DAFTAR NAMA PENERIMA INSENTIF DAERAH DISDIKBUD TALA (OPS)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH LAUT tanggal 04 Desember
2019
26. DAFTAR NAMA PENERIMA INSENTIF DAERAH DISDIKBUD TALA (NON KATEGORI 2)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH LAUT tanggal 04 Desember
2019

27. DAFTAR NAMA PENERIMA INSENTIF DAERAH
DISDIKBUD TALA (KONDISI KHUSUS)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH LAUT tanggal 04 Desember
2019

28. DAFTAR NAMA PENERIMA INSENTIF DAERAH
DISDIKBUD TALA (KATEGORI 2)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH LAUT tanggal 04 Desember
2019

29. DAFTAR NAMA PENERIMA INSENTIF DAERAH
DISDIKBUD TALA (GURU BANTU BHAKTI)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH LAUT tanggal 04 Desember
2019

30. SURAT EDARAN PERPANJANGAN PTT/GTT TAHUN
2020

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH LAUT tanggal 18 Desember
2019

- **Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi**

Terealisasi sebanyak 4 Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan target 3 KIM, sehingga persentase realisasi adalah 133%.

Pada tahun 2019 ini diperoleh jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi berjumlah 4 Kelompok dengan target tahun 2019 yaitu 3 KIM, sehingga diperoleh nilai realisasi yaitu 133 %. Sedangkan pada tahun 2018 telah terbentuk 6 KIM, namun kelompok tersebut belum mempunyai SK pembentukannya sehingga dianggap belum mencukupi untuk memenuhi syarat terbentuknya KIM, sehingga

terdefinisi 0 (nol). Baru di tahun 2019 KIM dibentuk dengan adanya SK pembentukan resmi. Pada tahun 2019 ini capaian target berhasil tercapai dan melebihi target. Permasalahan yang dihadapi yakni masih adanya wilayah yang tidak memiliki jaringan internet yang baik sehingga terkendala saat mempublikasikan informasi melalui media website ataupun media sosial lainnya. Untuk selanjutnya Pembinaan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat ini akan terus dilakukan pembenahan dan peningkatan dalam pengelolaan teknologi informasi untuk masyarakat serta dengan menjalin koordinasi dengan Kepala Desa dan Camat untuk turut mendukung pembinaan KIM yang lebih intensif.

- Jumlah informasi pembangunan kabupaten yang disebarluaskan melalui media massa daerah

Terealisasi sebanyak 240 informasi/berita (target 240 informasi) dan juga terealisasi 100%. Informasi yang disebarluaskan melalui media massa pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui yaitu melalui Media Sosial dan website. Selain keberhasilan juga terdapat kendala yang dihadapi diantaranya kurangnya sarana dan prasarana dalam kegiatan peliputan berita/informasi dan kurangnya SDM dalam bidang jurnalistik. Strategi kedepan yang dipersiapkan adalah pengusulan penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran peliputan dan menambah tenaga pelaksana pemberitaan.

Tabel 3.11 Rekap informasi/berita tahun 2019

| NO. | BULAN | BERITA | |
|-----|---------|--------|-----|
| | | MEDSOS | WEB |
| 1. | Januari | 10 | 9 |

| | | | |
|--------|-----------|-----|-----|
| 2. | Februari | 7 | 14 |
| 3. | Maret | 12 | 12 |
| 4. | April | 10 | 5 |
| 5. | Mei | 10 | 11 |
| 6. | Juni | 9 | 10 |
| 7. | Juli | 10 | 12 |
| 8. | Agustus | 12 | 6 |
| 9. | September | 10 | 5 |
| 10. | Oktober | 17 | 4 |
| 11. | November | 13 | 7 |
| 12. | Desember | 18 | 7 |
| JUMLAH | | 138 | 102 |
| TOTAL | | 240 | |

3.1.2 Kepala Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik

Tabel 3.12 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

| NO | SASARAN STRATEGIS | KINERJA UTAMA | TARGET | REALISASI | PERSEN TASE CAPAIAN | TARGET AKHIR RENSTRA |
|-------------------|--|--|---------------|---------------|---------------------|----------------------|
| 1. | Melaksanakan pengelolaan layanan komunikasi publik | Jumlah data layanan jaringan komunikasi publik | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 % | 10 dokumen |
| | | Jumlah permohonan rekomendasi pendirian menara telekomunikasi di Kabupaten Tanah Laut yang terpenuhi | 10 permohonan | 23 permohonan | 230 % | 50 permohonan |
| Rata-Rata Capaian | | | | | 165 % | |

- **Jumlah data layana jaringan komunikasi publik**

Terealisasi sebanyak 2 dokumen dengan target 2 dokumen, yang berarti telah terealisasi 100%. Data layanan jaringan komunikasi publik diperoleh melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Tanah Laut.

Dengan adanya pendataan tersebut dapat memberikan manfaat guna menentukan target retribusi dan ketersediaan data menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Untuk kedepannya akan dilakukan pengawasan secara intensif dengan menambah mobilitas dalam rangka menunjang akurasi data.

- **Jumlah permohonan rekomendasi pendirian menara telekomunikasi di Kabupaten Tanah Laut yang terpenuhi**

Terealisasi sebanyak 23 permohonan dengan target 10 permohonan, yang berarti realisasi telah melebihi target 100% dengan persentase capaian 230%, terjadi peningkatan yang melampaui target yang ada. Hal ini terjadi dikarenakan sulitnya penentuan target tahunan terhadap permohonan yang diajukan oleh pihak ketiga yang kadang meningkat ataupun menurun. Adapun permasalahan yang sering dihadapi ialah kelengkapan persyaratan yang terlambat sehingga juga memperlambat penerbitan surat rekomendasi pendirian menara telekomunikasi. Permasalahan lain yang juga serta sering terjadi ialah adanya menara telekomunikasi yang telah berdiri sebelum pengurusan izin oleh pihak ketiga. Langkah kedepan yang akan dilakukan yaitu dengan menyiarkan informasi tentang syarat-syarat permohonan rekomendasi pendirian menara melalui website ataupun radio.

4.1 Hasil capaian realisasi sasaran 3.1 dan 3.2 pada Bidang Penyelenggaraan E-Government

Tabel 3.13 Hasil capaian realisasi sasaran 3.1 dan 3.2

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKTOR KINERJA | TARGET | REALISASI | PERSENTASE CAPAIAN | TARGET AKHIR RENSTRA |
|-------------------|--|--|--------|-----------|--------------------|----------------------|
| 1 | 3.1 Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) | Persentase SKPD yang menerapkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) | 8,9% | 8,9% | 100% | |
| 2 | 3.2 Meningkatnya penggunaan domain resmi pemerintah Kabupaten Tanah Laut | Persentase kenaikan penggunaan domain tanahloutkab.go.id | 10% | 10% | 100% | |
| Rata-Rata Capaian | | | | | 100% | |

Selanjutnya tabel berikut menyajikan perbandingan kinerja tahun 2019 dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.14 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023

| NO | INDIKATOR KINERJA | REALISASI | TAHUN 2019 | | |
|-------------------|--|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | 2018 | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN |
| 1. | Persentase SKPD yang menerapkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) | 54% | 8,9% | 8,9% | 100 |
| 2. | Persentase kenaikan penggunaan domain tanahloutkab.go.id | N/A | 10% | 10% | 100 |
| Rata-rata Capaian | | | | | 100 |

a) *Perbandingan Realisasi Dengan Target*

Rata-rata Capaian Kinerja bidang penyelenggaraan e-government telah terealisasi 100%. Dari 2 indikator kinerja, indikator persentase SKPD yang menerapkan SPBE telah tercapai 8,9% dan target 8,9% tahun 2019 sehingga persentase

capaiannya 100%. Untuk 1 indikator lainnya juga telah tercapai 10% dari target tahun 2019 (10%), persentase capaiannya pun 100%.

b) Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait

Perbandingan target tahun 2019 dengan tahun 2018 yang terdiri dari indikator persentase SKPD yang menerapkan SPBE telah tercapai 100% pada tahun 2019 sedangkan pada tahun 2018 hanya tercapai 54%. Sedangkan pada indikator Persentase kenaikan penggunaan domain tanahlautkab.go.id juga telah terealisasi 10% dengan target 10% sehingga tercapai 100%.

c) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

- Persentase SKPD yang menerapkan SPBE

Persentase SKPD yang menerapkan SPBE yang dilaksanakan oleh Bidang Penyelenggaraan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut di tahun 2019 telah mencapai 100% dari target yang ada. Data tersebut diperoleh dari hasil kerjasama Bidang Penyelenggaraan E-Government dengan empat SKPD dalam penerapan SPBE dalam pelayanannya yaitu BKPSDM, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Perputakaan dan Kearsipan. SKPD yang Penerapan SPBE baru mulai dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tahun 2018 sehingga hasil yang diperoleh pada tahun tersebut masih belum maksimal. Pada tahun 2019 ini proses pencapaian tersebut didukung dengan baik oleh Kepala Daerah dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 174 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Tanah Laut, sehingga SKPD dapat meningkatkan pemahaman tentang perlunya Penerapan SPBE.

Keberhasilan capaian ini merupakan hasil dari kerja sama dan koordinasi dari seluruh instansi terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut guna menyukseskan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di daerah guna menghadapi era digital yang terus berkembang. Adapun permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut adalah kurangnya infrastruktur TIK dan belum terintegrasinya jaringan antar SKPD sehingga pencapaian belum maksimal. Adapun kegiatan yang berkaitan dengan penerapan SPBE tersebut dalam bentuk konsultasi/koordinasi dan juga pemberian rekomendasi pembuatan jaringan dan perangkat yang diperlukan oleh SKPD dalam penerapan SPBE. Untuk kedepannya perlu diadakan sosialisasi pelaksanaan Peraturan Bupati tentang SPBE tersebut.

- **Persentase kenaikan penggunaan domain tanahlautkab.go.id**

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Penyelenggaraan E-Government untuk pencapaian Persentase kenaikan penggunaan domain tanahlautkab.go.id pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut di tahun 2019 telah mencapai 100% dari target yang ada. Data diperoleh dari persentase penggunaan domain pada tahun 2019 sebanyak 35% (14 instansi) dan tahun 2018 sebanyak 25% (10 instansi) dengan kenaikan 10%. Adanya Penerapan SPBE juga berdampak dalam upaya menaikkan penggunaan domain resmi pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Pada tahun 2019 ini proses pencapaian tersebut. Adanya koordinasi dalam pembuatan sistem informasi maupun aplikasi guna mendukung terlaksananya sistem yang terintegrasi. Pada tahun 2019, beberapa SKPD telah membuat Aplikasi untuk mempermudah pelayanan terhadap

masyarakat dan telah terintegrasi dengan website resmi SKPD. Permasalahan yang masih ditemukan adalah kurangnya kesadaran tentang pengelolaan website resmi SKPD sebagai media informasi dan komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat. Untuk kedepannya perlu adanya sosialisasi tentang pentingnya peranan website resmi SKPD sebagai media informasi dan komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat.

d) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

1. Penyediaan layanan internet dan layanan data pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
2. Pengelolaan aplikasi e-lapor Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
3. Perencanaan dan penyediaan peralatan infrastruktur dan jaringan untuk peningkatan pengelolaan Network Operation Center (NOC) Diskominfo.
4. Upgrade sistem
5. Kerjasama Tim Pengembangan Teknologi Informasi dalam peningkatan e-government
6. Kerjasama/koordinasi serta monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan informasi publik

e) Analisis Realisasi Anggaran Program

Pelaksanaan program kegiatan Bidang Penyelenggaraan E-Government hampir terlaksana secara keseluruhan secara fisik pada program kerjasama informasi dengan mas media dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.645.492.645,- dari pagu program Rp 1.831.628.100,- dengan persentase capaian 89,84 %.

4.1.1 Kepala Seksi Infastruktur dan Jaringan

Tabel 3.15 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

| NO | SASARAN STRATEGIS | KINERJA UTAMA | TARGET | REALISASI | PERSENTASE CAPAIAN | TARGET AKHIR RENSTRA |
|---|--|--|--------------|-----------|--------------------|----------------------|
| 1. | Memfasilitasi dan memberikan layanan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang SPBE di Kabupaten Tanan Laut | Jumlah sarana dan prasarana TIK penunjang SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) | 1 unit | 1 unit | 100 % | 5 unit |
| Jumlah SKPD yang menggunakan jaringan e-government | | 4 SKPD | 6 SKPD | 150% | 20 SKPD | |
| Jumlah permohonan rekomendasi SKPD terkait pengelolaan tata kelola TIK yang terpenuhi | | 2 permohonan | 2 permohonan | 100 % | 10 permohonan | |
| Rata-Rata Capaian | | | | | 116,6 % | |

- **Jumlah sarana dan prasarana TIK penunjang SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)**

Terealisasi sebanyak 1 unit dengan target 1 unit, yang berarti telah terealisasi 100%. Sarana dan prasarana TIK penunjang SPBE diperoleh melalui proses perencanaan pengadaan pada kegiatan pembinaan jaringan komunikasi dan media massa. Dengan tersedianya server untuk *backup mirroring* aplikasi Pemerintah Daerah yang dapat digunakan untuk beberapa aplikasi. Permasalahan yang terjadi adalah perlu adanya ruang server atau data center yang representatif untuk menampung semua server dan

perangkat jaringan. Kedepannya akan direncanakan pembangunan gedung data center dan Command Center guna mengatasi permasalahan yang ada.

- **Jumlah SKPD yang menggunakan jaringan E-Government**

Terealisasi sebanyak 6 SKPD dengan target 4 SKPD, yang berarti realisasi telah melebihi target 100% dengan persentase capaian 150%, terjadi peningkatan yang melampaui target yang ada. Hal ini terjadi dikarenakan percepatan implementasi SPBE oleh beberapa SKPD (BKPSDM, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, DP2KBP3A, Kecamatan Bajuin, Kecamatan Kurau dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Beberapa permasalahan yang dihadapi ialah Struktur Geografis di Kabupaten Tanah Laut yang merupakan Dataran tinggi dan kurang tingginya tower Diskominfo menyebabkan beberapa kecamatan tidak bisa terjangkau Jaringan Wireless. Langkah kedepan yang akan dilakukan yaitu perlu adanya tower yang tingginya minimal 70 meter sesuai DED Jaringan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tahun 2019.

- **Jumlah permohonan rekomendasi SKPD terkait pengelolaan tata kelola TIK yang terpenuhi**

Terealisasi sebanyak 2 permohonan dengan target 2 permohonan, yang berarti realisasi telah mencapai 100%. Keberhasilan capaian ini dikarenakan adanya koordinasi yang baik dari SKPD yang memohon guna mendukung percepatan implementasi SPBE di Kabupaten Tanah Laut. Permohonan tersebut yaitu

permohonan penggunaan Virtual Server untuk Aplikasi SIMGAJI oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut dan SI BEP HATA oleh Bapenda Kabupaten Tanah Laut. Sedangkan permasalahan yang dihadapi ialah belum adanya ruangan server yang representatif. Langkah kedepan yang akan dilakukan yaitu perlu adanya ruang server atau data center yang representatif untuk menampung semua server dan perangkat jaringan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

4.1.2 Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi

Tabel 3.16 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

| No | SASARAN STRATEGIS | KINERJA UTAMA | TARGET | REALISASI | PERSentase CAPAIAN | TARGET AKHIR RENSTRA |
|-------------------|---|--|------------|------------|--------------------|----------------------|
| 1. | Memfasilitasi dan memberikan layanan untuk pengembangan dan pengelolaan aplikasi penunjang SPBE di Kabupaten Tanah Laut | Jumlah permohonan penggunaan domain tanahlautkab.go.id | 2 SKPD | 2 SKPD | 100 % | 2 SKPD |
| | | Jumlah pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan aplikasi penunjang SPBE | 2 aplikasi | 4 aplikasi | 200% | 2 aplikasi |
| | | Jumlah SKPD yang mendapatkan pembinaan dan sosialisasi tentang pengelolaan aplikasi daerah | 20 SKPD | 40 SKPD | 200 % | |
| Rata-Rata Capaian | | | | | 166 % | |

- **Jumlah permohonan penggunaan domain tanahloutkab.go.id**

Terealisasi sebanyak 2 SKPD dengan target 2 SKPD, yang berarti telah terealisasi 100%. Penggunaan domain tanahloutkab.go.id bertujuan agar SKPD memakai domain resmi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan. Terealisasinya permohonan domain Sekretariat DPRD Tanah Laut dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut dilakukan dengan koordinasi yang baik. Kedepannya telah dibuat Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aplikasi Daerah sehingga penggunaan sistem informasi/aplikasi mempunyai payung hukum yang jelas.

- **Jumlah pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan aplikasi penunjang SPBE**

Terealisasi sebanyak 4 aplikasi dengan target 2 aplikasi, yang berarti realisasi telah melebihi target 100% dengan persentase capaian 200%, terjadi peningkatan yang melampaui target yang ada. Hal ini terjadi dikarenakan terkelolanya Aplikasi penunjang e-Government seperti E-Lapor, SIAB, E-Kita dan Satu Data Tanah Laut, dimana aplikasi tersebut digunakan oleh seluruh SKPD secara bersama dalam menunjang SPBE. Beberapa permasalahan yang dihadapi ialah perlu tambahan personil untuk mengakomodir permintaan pembuatan Aplikasi dari SKPD.

- **Jumlah SKPD yang mendapatkan pembinaan dan sosialisasi tentang pengelolaan aplikasi daerah**

Terealisasi sebanyak 40 SKPD dengan target 20 SKPD, yang berarti realisasi telah melebihi target 100% dengan persentase capaian 200%, terjadi peningkatan yang melampaui target yang ada. Hal ini terjadi dikarenakan adanya pelaksanaan sosialisasi yang intensif kepada 40 SKPD dalam Aplikasi e-Lapor dan SIAB terkelolanya Aplikasi penunjang e-Government seperti E-Lapor, SIAB, E-Kita dan Satu Data Tanah. Kedepannya perlu anggaran dalam pemeliharaan dan pengembangan aplikasi-aplikasi tersebut.

5.1 Hasil capaian realisasi sasaran 1.3 dan 3.5 pada Bidang Statistik dan Persandian

Tabel 3.17 Hasil capaian realisasi sasaran 1.3 dan 3.5

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKTOR KINERJA | TARGET | REALISASI | PERSENTASE CAPAIAN | TARGET AKHIR RENSTRANSTR |
|-------------------|--|--|--------|-----------|--------------------|--------------------------|
| 1 | 1.3 Meningkatnya SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi) | Persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi) | 2,4% | 2,4% | 100% | |
| 2 | 5.3 Meningkatnya kualitas data sektoral daerah | Persentase statistik sektoral daerah | 80% | 80% | 100% | |
| Rata-Rata Capaian | | | | | 100% | |

Selanjutnya tabel berikut menyajikan perbandingan kinerja tahun 2019 dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.18 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023

| No. | INDIKATOR KINERJA | REALISASI | TAHUN 2019 | | |
|-----|-------------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | 2018 | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN |

| | | | | | |
|-------------------|--|-----|------|------|-----|
| 1. | Persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi) | N/A | 2,4% | 2,4% | 100 |
| 2. | Persentase statistik sektoral daerah | 70% | 80% | 80% | 100 |
| Rata-rata Capaian | | | | | 100 |

a) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Rata-rata Capaian Kinerja bidang Statistik dan Persandian telah terealisasi 100%. Dari 2 indikator kinerja, indikator persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi) telah tercapai 2,4 % dan target 2,4% tahun 2019 sehingga persentase capaiannya 100%. Untuk 1 indikator lainnya juga telah tercapai 80% dari target tahun 2019 (80%), persentase capaiannya 100%.

b) Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait

Perbandingan target tahun 2019 dengan tahun 2018 yang terdiri dari indikator persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi) telah tercapai 100% pada tahun 2019 sedangkan pada tahun 2018 kegiatan ini belum dilaksanakan sehingga realisasinya masih tidak ada. Baru di tahun 2019 diperoleh hasil realisasi 2,4 %. Sedangkan pada indikator Persentase statistik sektoral juga telah terealisasi 80% dengan target 80% sehingga tercapai 100%.

c) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

- Persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)

Persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi) yang dilaksanakan oleh Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Tanah Laut di tahun 2019 telah mencapai 100% dari target yang ada. Pemanfaatan persandian baru dilaksanakan pada tahun 2019 ini sehingga hasil yang diperoleh pada tahun tersebut masih belum maksimal. Dengan adanya dukungan dari Kepala Daerah serta kerja sama yang solid antar SKPD terkait sehingga target dapat tercapai. Keberhasilan capaian ini turut mendukung guna menyukseskan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Implementasi persandian/keamanan informasi diterakan dengan menggunakan tanda tangan elektronik pada dokumen/informasi/data elektronik. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan ini adalah transformasi persandian yang semula hanya mengurus keamanan informasi rahasia (santel) menjadi kegiatan keamanan informasi secara keseluruhan belum tersosialisasikan dengan baik. Pengamanan informasi harus mengikuti perkembangan TIK yang sangat pesat, sehingga sumber daya yang ada dapat menyesuaikan dengan isu-isu teknologi terkini. Strategi kedepan ialah perlunya penambahan personil bidang keamanan informasi dan keamanan siber , maupun adanya pelatihan/bimbingan teknis/koordinasi/ tentan keamanan informasi dengan instansi-instansi terkait.

- **Persentase statistik sektoral daerah**

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Statistik dan Persandian dalam pencapaian Persentase statistik sektoral daerah Kabupaten Tanah Laut di tahun 2019 telah mencapai 80% dari target yang ada dengan persentase capaian 100%. Semua SKPD telah melakukan input indikator data pada aplikasi Satu Data Tanah Laut sehingga target telah tercapai 80 %. Aplikasi Satu Data perlu dikembangkan/update sistem untuk dapat lebih banyak melakukan input data. Kendala dalam pelaksanaannya ialah setiap SKPD hanya menunjuk

satu orang admini untuk melakukan input data pada aplikasi sehingga sering telambat dalam input data. Langkah kedepan perlu pengembangan aplikasi satu data TanahLaut untuk menunjang kegiatan penyusunan profil daerah.

d) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

1. Focus Group Discussion (FGD) dalam pengelolaan data statistik.
2. Sosialisasi Satu Data Tanah Laut.
3. Pemantauan keterisian data pada aplikasi Satu Data.
4. Pengembangan dan update sistem

5.1.1 Kepala Seksi Persandian

Tabel 3.19 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

| NO | SASARAN STRATEGIS | KINERJA UTAMA | TARGET | REALISASI | PERSENTASE CAPAIAN | TARGET AKHIR RENSTRA |
|-------------------|---|--|--------|-----------|--------------------|----------------------|
| 1. | Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan persandian, keamanan informasi | Jumlah SKPD yang paham tentang pengelolaan persandian dan keamanan informasi | 1 SKPD | 1 SKPD | 100 % | 5 SKPD |
| | | Jumlah SKPD yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi | 2 SKPD | 2 SKPD | 100% | 10 SKPD |
| | | Jumlah sosialisasi persandian dan keamanan informasi | 1 kali | 1 kali | 100 % | 5 kali |
| Rata-Rata Capaian | | | | | 100 % | |

a) *Perbandingan Realisasi Dengan Target*

Rata-rata capaian Kepala Seksi Persandian tahun 2019 sebesar 100%. Terdiri dari 3 indikator, yaitu indikator Jumlah SKPD yang paham tentang pengelolaan persandian dan keamanan informasi dengan target 1 SKPD tercapai 100% (1 SKPD), indikator Jumlah SKPD yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi dengan target 2 SKPD tercapai 100% (2 SKPD), dan indikator Jumlah sosialisasi persandian dan keamanan informasi target 1 kali tercapai 100% (1 kali).

b) *Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait*

Perbandingan pencapaian target tahun 2019 dengan tahun 2018 terdiri dari 3 indikator, yaitu indikator jumlah SKPD yang paham tentang persandian tahun 2018 masih belum ada data karena kegiatan belum terlaksana dan tahun 2019 tercapai 100% sesuai target, indikator jumlah SKPD yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi tahun 2018 belum ada hasil dan tahun 2019 tercapai 100% sesuai target yang ada, dan indikator jumlah sosialisasi persandian dan keamanan informasi tahun 2018 tidak ada indikator dan tahun 2019 tercapai 100% (1 kali) yang dilaksanakan di Ruang CAT BKPSDM Kabupaten Tanah Laut.

c) *Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja*

- **Jumlah SKPD yang paham tentang pengelolaan persandian dan keamanan informasi**

Jumlah SKPD yang paham tentang Persandian tercapai 1 SKPD pada tahun 2019 (100%) sedang pada tahun 2018 belum ada. Keberhasilan-keberhasilan yang dicapai adalah meningkatnya SKPD yang paham tentang pengelolaan Persandian dan keamanan informasi. SKPD

yang telah memahami tentang pentingnya persandian dan keamanan informasi adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.

- **Jumlah SKPD yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi**

Terealisasi sebanyak 2 SKPD dengan target 2 SKPD, yang berarti realisasi telah mencapai target 100%. Hal Keberhasilan ini dicapai dengan pelaksanaan pengamanan informasi pada dokumen perizinan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Satu Pintu dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

- **Jumlah sosialisasi persandian dan keamanan informasi**

Terealisasi sebanyak 1 kali dengan target 1 kali kegiatan, yang berarti realisasi telah mencapai 100%. Keberhasilan capaian ini dikarenakan adanya koordinasi yang baik dari SKPD yang memohon guna mendukung percepatan implementasi SPBE di Kabupaten Tanah Laut. Kesadaran keamanan informasi penambahan wawasan mengenai metode/teknik pengamanan informasi. Langkah kedepan yang akan dilakukan pelatihan ataupun bimtek tentang persandian dan keamanan informasi.

5.1.2 Kepala Seksi Pengelolaan Statistik

Tabel 3.20 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

| NO | SASARAN STRATEGIS | KINERJA UTAMA | TARGET | REALISASI | PERSentase CAPAIAN | TARGET AKHIR RENSTRA |
|----|-------------------|---------------|--------|-----------|--------------------|----------------------|
|----|-------------------|---------------|--------|-----------|--------------------|----------------------|

| | | | | | | |
|-------------------|---|--|------------|------------|-------|------------|
| 1. | Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan pengisian indikator pada aplikasi Satu Data Tanah Laut | Jumlah aplikasi Satu Data yang memadai | 1 aplikasi | 1 aplikasi | 100 % | 1 aplikasi |
| | | Jumlah buku Data Statistik Sektoral | 1 buku | 1 buku | 100% | 1 buku |
| | | Jumlah Admin Satu Data SKPD yang mampu dalam pengisian indikator/element aplikasi Satu Data Tanah Laut | 20 orang | 46 orang | 230 % | 20 orang |
| Rata-Rata Capaian | | | | | 143 % | |

- **Jumlah aplikasi Satu Data yang memadai**

Terealisasi sebanyak 1 aplikasi dengan target 1 aplikasi, yang berarti telah terealisasi 100%. Tersedianya aplikasi Satu Data yang memadai bertujuan agar data yang tersedia dapat akurat dan dipertanggungjawabkan. Beberapa data dari beberapa SKPD dikumpulkan ke dalam satu sistem aplikasi yaitu aplikasi Satu Data yang diinputkan langsung oleh masing-masing admin SKPD sehingga tidak terjadi perbedaan-perbedaan data yang mendasar. Kedepannya Aplikasi Satu Data masih harus dikembangkan seiring berkembangnya kebutuhan-kebutuhan data di Lingkup Pemerintah Kabupaten TanahLaut.

- **Jumlah buku data statistik sektoral**

Terealisasi sebanyak 1 buku dengan target 1 buku, yang berarti realisasi telah mencapai target 100%. Keberhasilan atas capaian ini merupakan usaha dari seluruh elemen terkait dalam usaha mengumpulkan dan meninputkan data ke dalam Aplikasi Satu Data

Tanah Laut. Dari seluruh data yang terhimpun akan diidentifikasi dan diklasifikasikan secara sektoral olah analisis statistik dan Kepala Seksi Pengelolaan Statistik sesuai bimbingan Kepala Bidang Statistik dan Persandian serta arahan dari Kepala Dinas Kominfo, kemudian data tersebut disusun menjadi buku data statistik sektoral daerah Kabupaten Tanah Laut atau diberi nama ikhtisar statistik Sektoral Kabupaten Tanah Laut. Beberapa permasalahan yang dihadapi ialah perlunya menambah wawasan bagi admin Satu Data Tanah Laut dalam pengelolaan data karena data dalam aplikasi perlu dianalisis untuk mendapatkan informasi statistik yang bisa dipublikasikan sehingga perlu penyusunan buku-buku statistik yang lain.

- **Jumlah Admin Satu Data SKPD yang mampu dalam pengisian indikator/elemen aplikasi Satu Data Tanah Laut**

Terealisasi sebanyak 46 orang dengan target 20 orang yang berarti realisasi telah melebihi target 100% dengan persentase capaian 230%, terjadi peningkatan yang melampaui drastis dari target yang ada. Hal ini dikarenakan seluruh admin SKPD sungguh-sungguh dalam proses belajar dan menginput data ke dalam aplikasi Satu Data. Kedepannya perlu menambah wawasan bagi admin Satu Data.

6.1 Hasil capaian realisasi sasaran 2.1, 3.3 dan 3.4 pada Sekretariat

Tabel 3.21 Hasil capaian realisasi sasaran 3.3 dan 3.4

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKTOR KINERJA | TARGET | REALISASI | PERSENTASE CAPAIAN | TARGET AKHIR RENSTRA |
|-----|------------------------------------|---|--------|-----------|--------------------|----------------------|
| 1 | 2.1 Meningkatkan fasilitas layanan | Persentase SKPD yang difasilitasi dalam | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | |
|-------------------|--|---|------|-------|---------|------|
| | SKPD dalam pengembangan inovasi | pengembangan inovasi | | | | |
| 2 | 3.3 Meningkatnya tata kelola administrasi umum dan kepegawaian | Persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | 3.4 Meningkatnya kualitas pelaporan dan perencanaan | Nilai SAKIP SKPD | 78 | 71,18 | 91,26% | 82 |
| Rata-Rata Capaian | | | | | 97,09 % | |

Selanjutnya tabel berikut menyajikan perbandingan kinerja tahun 2019 dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.22 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023

| NO | INDIKATOR KINERJA | REALISASI | TAHUN 2019 | | |
|-------------------|---|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | 2018 | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN |
| 1. | Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi | N/A | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Nilai SAKIP SKPD | 64 | 78 | 71,18 | 91,26 |
| Rata-rata Capaian | | | | | 97,09 |

a) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Rata-rata Capaian Kinerja Sekretariat telah terealisasi 97,09 %. Dari 3 indikator kinerja, Indikator persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi telah tercapai 100% dari target 100%. Indikator persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu telah

tercapai 100 % dan target 100 % tahun 2019 sehingga persentase capaiannya 100%. Untuk indikator nilai SAKIP SKPD hanya tercapai nilai sakip 71,18 dari target tahun 2019 nilai 78, yang disebabkan masih banyaknya perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sehingga persentase akhir capaiannya 97,09 %.

b) Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait

Perbandingan target tahun 2019 dengan tahun 2018 yang terdiri dari indikator persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu telah tercapai 100% pada tahun 2019 sedangkan pada tahun 2018 realisasinya 100%. Indikator persentase indikator nilai SAKIP SKPD juga telah terealisasi 71,18 dengan target 78% sehingga hanya tercapai 91,26%.

c) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

- Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi

Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi yang dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut di tahun 2019 telah mencapai 100% dari target yang ada. Persentase capaian dihitung dari jumlah SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi dibagi jumlah permohonan SKPD dikali 100%. Ada tiga buah SKPD yang memohon fasiltisi dan dari ketiganya telah diproses sesuai permohonan yaitu dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut (permohonan pembuatan website), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut (permohonan aplikasi) dan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut (permohonan

IP Public, Server Virtual serta prasarana pendukung). Proses fasilitasi dilakukan melalui surat permohonan dari SKPD yang bersangkutan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, yang kemudian didisposisi oleh Kepala Dinas kepada Bidang Penyelenggaraan E-Government untuk diproses dan ditindaklanjuti. Strategi kedepannya ialah perlunya menyediakan layanan terpadu satu pintu pada setiap surat permohonan yang masuk kepada Dinas dan menyiapkan penjadwalan petugas informasi guna pelayanan e-government yang lebih baik.

- **Persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu**

Persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu yang dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut di tahun 2019 telah mencapai 100% dari target yang ada yaitu sebanyak 65 berkas yang terdiri atas 53 berkas pengajuan berkala, pensiun, naik pangkat, cuti tahunan, penyesuaian ijazah, izin belajar, penugasan diklat, pengusulan pelaksana tugas (plt) / pelaksana harian (plh), pelaporan LHKASN dan LHKPN serta berkas administrasi pengadaan sarana dan prasarana umum dinas. Proses pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian ditangani dengan baik oleh sub bagian umum dan kepegawaian. Strategi kedepannya ialah perlunya penambahan tenaga personil kepegawaian untuk membantu urusan kepegawaian dan juga perlu peningkatan SDM pegawai karena terus berkembangnya kebutuhan akan sistem kepegawaian dari pengelolaan absensi dan pengelolaan umum, aset dan lain-lain.

- **Nilai SAKIP SKPD**

Nilai SAKIP SKPD di tahun 2019 hasil dari evaluasi dari Tim evaluasi Inspektorat Kabupaten Tanah Laut telah memperoleh nilai 71,18 (kategori BB) dari target yang ada (78) dengan persentase capaian 91,26%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Dari hasil evaluasi direkomendasikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Terhadap dokumen perencanaan perlu dilakukan perbaikan pada sasaran dan indikator yang disesuaikan dengan kondisi saat ini dan perlu dilakukan monitoring secara berkala terhadap dokumen perjanjian kinerja agar dapat dijadikan dasar pemberian *reward* dan *punishment*.

b. Pengukuran Kinerja

Perlunya pemanfaatan IKU dan target kinerja untuk penilaian prestasi kinerja individu, *reward* dan *punishment* serta penilaian prestasi kerja bagi pejabat yang telah menandatangani PK.

c. Pelaporan Kinerja

Informasi dan data kinerja yang andal agar dimanfaatkan untuk perbaikan dan meningkatkan kinerja.

d. Evaluasi Internal

Perlu adanya pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja Lapkin beserta hambatannya dan perlu dilaksanakannya evaluasi terhadap rencana aksi dan dilakukan perbaikan dalam bentuk langkah-langkah yang nyata.

e. Pencapaian Kinerja

Informasi yang disajikan agar digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan

organisasi; informasi yang disajikan agar digunakan untuk peningkatan kinerja; serta perlunya ditingkatkan pencapaian target kinerja sehingga nilai hasil evaluasi dapat mengalami kenaikan.

d) Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

1. Pengelolaan administrasi umum.
2. Pengelolaan data kepegawaian.
3. Pengelolaan data aset dinas.
4. Pelayanan persuratan dinas.
5. Pengelolaan administrasi keuangan.
6. Pengelolaan pelaporan kinerja dan keuangan.

e) Analisis Realisasi Anggaran Program

Pelaksanaan program kegiatan Sekretariat hampir terlaksana secara keseluruhan secara fisik pada program Pelayanan administrasi perkantoran dengan realisasi anggaran sebesar Rp 906.593.485,- dari pagu program Rp 1.014.144.059,06 dengan persentase capaian 89,39 %. Pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan realisasi anggaran sebesar Rp 267.800.000,- dari pagu program Rp 294.450.000,- dengan persentase capaian 90,95 %. Pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan realisasi anggaran sebesar Rp 0,- dari pagu program Rp 45.000.000,- dengan persentase capaian 0 %, hal ini disebabkan kurangnya minat dari beberapa ASN dalam mengikuti bimbingan teknis. Pada program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 995.900,- dari pagu program Rp 2.551.900,- dengan persentase capaian 60,97 %. Pada program peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp

975.000,- dari pagu program Rp 4.500.000,- dengan persentase capaian 21,67 %.

6.1.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 3.23 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

| NO | SASARAN STRATEGIS | KINERJA UTAMA | TARGET | REALISASI | PERSentase CAPAIAN | TARGET AKHIR RENSTRA |
|-------------------|--|--|-----------|-----------|--------------------|----------------------|
| 1. | Melaksanakan Fasilitasi pengembangan inovasi | Jumlah permohonan fasilitasi pengembangan inovasi | 3 SKPD | 3 SKPD | 100 % | 15 SKPD |
| 2. | Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta aset daerah | Jumlah administrasi umum dan kepegawaian yang terpenuhi | 65 berkas | 65 berkas | 100 % | 65 berkas |
| | | Jumlah kepesertaan untuk pendidikan dan pelatihan formal | 9 orang | 0 orang | 0% | 10 orang |
| | | Jumlah laporan pengelolaan aset daerah | 2 laporan | 2 laporan | 100 % | 2 laporan |
| Rata-Rata Capaian | | | | | 75 % | |

d) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Rata-rata capaian Kepala Sub Bagian Umum dan Kasubbag 2019 sebesar 100%. Terdiri dari sasaran dengan 4 indikator, yaitu indikator Jumlah administrasi umum dan kepegawaian yang terpenuhi dengan target 65 berkas tercapai 65 berkas yang terdiri atas 53 berkas pengajuan berkala, pensiun, naik pangkat, cuti tahunan, penyesuaian ijazah, izin belajar, penugasan diklat, pengusulan pelaksana tugas (plt) / pelaksana harian (plh), pelaporan LHKASN dan LHKPN serta berkas administrasi pengadaan

sarana dan prasarana umum dinas. Indikator jumlah kepesertaan untuk pendidikan dan pelatihan formal dengan target 9 orang dengan hasil tidak ada capaian karena kurangnya minat dari ASN dalam mengikuti diklat maupun bimtek, indikator jumlah laporan pengelolaan aset daerah target 2 laporan yaitu laporan pengelolaan aset dan laporan pengelolaan barang habis pakai tercapai 100%.

e) *Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja*

- **Jumlah permohonan fasilitasi pengembangan inovasi**

Terealisasi sebanyak 3 SKPD dengan target 3 SKPD, yang berarti realisasi telah mencapai target 100%. Permohonan fasilitasi pengembangan fasilitasi ini diproses dengan adanya surat resmi dari SKPD yang meminta fasilitasi dalam pengembangan inovasi menggunakan teknologi informasi. Proses fasilitasi sendiri dilakukan oleh bidang penyelenggaraan E-government, sehingga hasilnya dapat langsung dilakukan penyediaan hosting domain atas inovasi yang dihasilkan. Namun dalam prosesnya juga dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tetap harus memperhatikan ketersediaan anggaran pada dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2019 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

- **Jumlah administrasi umum dan kepegawaian yang terpenuhi**

Indikator jumlah administrasi umum dan kepegawaian dengan target IKM nilai realisasinya yaitu 100% yang diperoleh dari urusan umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dan

ASN yang dilayani secara tertib dengan target 100%, nilai realisasinya yaitu 100%. ASN yang terlayani sebanyak 65 berkas orang dari 65 berkas orang ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut yang diajukan.

- Jumlah Jumlah Kepesertaan untuk pendidikan dan pelatihan formal

Indikator jumlah kepesertaan untuk pendidikan dan pelatihan formal dengan target 9 orang realisasinya yaitu 0%. Kurangnya minat ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam mengajukan diklat dan bimtek pada tahun 2019 sehingga hasil yang dicapai 0 orang.

- Jumlah laporan pengelolaan aset daerah

Terealisasi sebanyak 2 laporan dengan target 2 laporan, yang berarti realisasi telah mencapai target 100%. Laporan pengelolaan aset dinas dibuat 1 kali dalam setahun sedangkan laporan pengelolaan barang habis pakai dari awal tahun sampai dengan akhir tahun habis dikontrol. Keberhasilan ini dicapai dengan pelaksanaan pengelolaan aset-aset daerah dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2019 dan rencana anggaran kas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

5.1.2 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tabel 3.24 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

| NO | SASARAN STRATEGIS | KINERJA UTAMA | TARGET | REALISASI | PERSentase CAPAIAN | TARGET AKHIR RENSTRA |
|----|---|----------------------------------|-----------|-----------|--------------------|----------------------|
| 1. | Melaksanakan pengelolaan perencanaan dan keuangan serta | Jumlah dokumen perencanaan dinas | 3 dokumen | 3 dokumen | 100 % | 15 dokumen |

| | | | | | |
|-------------------------|--|------------|------------|-------|-------------|
| pelaporan kinerja dinas | Jumlah dokumen pelaporan kinerja dinas | 4 dokumen | 4 dokumen | 100% | 4 dokumen |
| | Jumlah dokumen laporan keuangan dinas | 32 dokumen | 32 dokumen | 100 % | 128 dokumen |
| Rata-Rata Capaian | | | | 100 % | |

- **Jumlah dokumen perencanaan dinas**

Terealisasi sebanyak 3 dokumen dengan target 3 dokumen, yang berarti telah terealisasi 100%. Dokumen tersebut yaitu dokumen Rencana Kerja Tahunan (Renja/RKT) Tahun 2019, dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun 2019 dan dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebagai dasar pembuatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019. Tersedianya dokumen perencanaan dinas sebagai bagian administrasi yang penting dalam pelaksanaan kegiatan.

- **Jumlah dokumen pelaporan kinerja dinas**

Terealisasi sebanyak 4 dokumen dengan target 4 dokumen, yang berarti realisasi telah mencapai target 100%. Dokumen pelaporan kinerja baik fisik maupun keuangan dinas adalah dokumen yang dibuat setiap triwulan I, II, III, dan IV yang berisi perekapan hasil capaian kinerja SKPD pada tahun berkenaan.

- **Jumlah dokumen laporan keuangan**

Terealisasi sebanyak 32 dokumen dengan target 32 dokumen yang berarti realisasi telah mencapai target 100%. Dokumen laporan keuangan tersebut terdiri atas 24 laporan bulanan bendahara penerimaan dan

pengeluaran, 8 laporan triwulan bendahara penerimaan dan pengeluaran. Dokumen laporan keuangan merupakan dokumen wajib SKPD yang harus dibuat dan dilaporkan setiap bulannya terkait pengeluaran dan penerimaan keuangan dinas.

TABEL 3.25 Tabel perbandingan realisasi Anggaran capaian Sasaran Strategis Tahun 2018 dengan Tahun 2019

| No | Program/Kegiatan | Jenis Kegiatan | Tahun 2018 | | | Tahun 2019 | | |
|----------|--|---|--------------------|--------------------|--------------|------------------------|--------------------|--------------|
| | | | Anggaran | Realisasi | % | Anggaran | Realisasi | % |
| 1 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya sarana dan prasarana administrasi perkantoran | 562.400.000 | 481.110.029 | 85,55 | 1.014.144.059,6 | 906.593.485 | 89,39 |
| 1.1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tersedianya sarana komunikasi, air dan listrik | 31.700.000 | 29.928.753 | 94,41 | 41.400.000 | 39.910.046 | 96,40 |
| 1.2 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 60.000.000 | 44.529.000 | 74,22 | 34.412.297 | 26.998.000 | 78,45 |
| 1.3 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 38.970.000 | 19.085.848 | 48,98 | 57.645.000 | 28.104.006 | 48,75 |
| 1.4 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Tersedianya jasa administrasi keuangan | 21.800.000 | 1.611.000 | 7,39 | 13.505.100 | 9.099.000 | 67,37 |
| 1.5 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Tersedianya jasa kebersihan kantor | 3.567.500 | 2.360.000 | 66,15 | 4.136.500 | 2.138.000 | 51,69 |
| 1.6 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor | 0 | 0 | 0 | 12.382.920 | 6.165.000 | 49,79 |
| 1.7 | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya alat tulis kantor | 12.317.500 | 10.662.500 | 86,56 | 14.404.000 | 10.464.500 | 72,65 |
| 1.8 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 5.350.000 | 3.256.750 | 60,87 | 6.492.500 | 5.079.320 | 78,23 |

| | | | | | | | | |
|----------|---|---|-------------------|----------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 1.9 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | 4.500.000 | 340.000 | 7,56 | 61.901.100 | 54.976.000 | 88,81 |
| 1.10 | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu | 12.730.000 | 8.160.260 | 64,10 | 19684.000 | 11.274.800 | 57,28 |
| 1.11 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terlaksanakannya kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 142.215.000 | 136.280.918 | 95,83 | 311,771.250 | 311.718.373 | 99,98 |
| 1.12 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah | Terlaksanakannya kegiatan koordinasi dan konsultasi di dalam daerah | 23.750.000 | 21.795.000 | 91,77 | 91.410.000 | 91.275.000 | 99,85 |
| 1.13 | Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD | Terbayarnya honorarium tenaga ahli dan pegawai tidak tetap/PTT | 205.500.000 | 203.100.000 | 98,83 | 344.999.392 | 309.391.440 | 89,68 |
| 2 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana Aparatur | 0 | 0 | 0 | 294.450.000 | 267.800.000 | 90,95 |
| 2.1 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional | 0 | 0 | 0 | 294.450.000 | 267.800.000 | 90,95 |
| 2 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Terlaksananya Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 15.000.000 | 0 | 0 | 45.000.000 | 0 | 0 |
| 2.1 | Pendidikan dan pelatihan formal | Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan formal | 15.000.000 | 0 | 0 | 45.000.000 | 0 | 0 |
| 3 | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Terlaksananya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 585.000 | 473.000 | 80,85 | 2.551.000 | 1.556.000 | 60,97 |

| | | | | | | | | |
|----------|--|---|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 3.1 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Terlaksananya kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 585.000 | 473.000 | 80,85 | 2.551.000 | 1.556.000 | 60,97 |
| 4 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | Terlaksananya pengembangan komunikasi, informasi dan media massa | 2.072.311.000 | 1.845.823.850 | 89,07 | 1.831.628.100 | 1.645.492.645 | 89,84 |
| 4.1 | Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi | Terlaksananya pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi | 1.724.105.000 | 1.558.888.850 | 90,42 | 1.163.000.000 | 1.086.497.215 | 93,42 |
| 4.2 | Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi | Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi | 169.000.000 | 156.128.000 | 92,38 | 598.898.100 | 498.492.430 | 83,23 |
| 4.3 | Penyusunan aplikasi sistem informasi | Terlaksananya kegiatan penyusunan aplikasi sistem informasi | 179.206.000 | 130.807.000 | 72,99 | 69.730.000 | 60.503.000 | 86,77 |
| 5 | Kerjasama Informasi Dengan Masa Media | Terlaksananya kerjasama informasi dengan masa media | 232.260.000 | 196.345.800 | 84,54 | 172.809.800 | 143.889.790 | 83,26 |
| 5.1 | Penyebarluasan informasi pembangunan daerah | Terlaksananya kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah | 3.000.000 | 3.000.000 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat | Terlaksananya kegiatan penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat | 232.260.000 | 196.345.800 | 84,54 | 172.809.800 | 143.889.790 | 83,26 |
| 6 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Kominfo | Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas kominfo | 65.250.000 | 34.576.156 | 52,99 | 44.787.500 | 4.260.197 | 9,51 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 6.1 | Pemeliharaan menara repeater | Terlaksananya kegiatan pemeliharaan menara repeater | 65.250.000 | 34.576.156 | 52,99 | 44.787.500 | 4.260.197 | 9,51 |
| 7 | Pengembangan Data/Informasi | Terwujudnya data/informasi | 55.142.100 | 51.854.400 | 94,04 | 28.054.100 | 22.215.750 | 79,19 |
| 7.1 | Penyusunan profile daerah | Terlaksananya kegiatan penyusunan profile daerah | 55.142.100 | 51.854.400 | 94,04 | 28.054.100 | 22.215.750 | 79,19 |
| 8 | Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah | Terlaksananya pengembangan pengelolaan asset daerah | 5.000.000 | 880.000 | 17,60 | 4.500.000 | 975.000 | 21,67 |
| 8.1 | Penyusunan tabulasi data aset tetap | Terlaksananya kegiatan penyusunan tabulasi data aset tetap | 5.000.000 | 880.000 | 17,60 | 4.500.000 | 975.000 | 21,67 |
| JUMLAH | | | 3.007.948.100 | 2.611.063.235 | 86,81 | 3.437.925.459,6 | 2.992.782.867 | 87,05 |

Dari tabel perbandingan realisasi anggaran capaian Sasaran Strategis Tahun 2018 dengan Tahun 2019 di atas dapat di lihat bahwa belanja langsung tahun 2018 dengan pagu anggaran Rp 3.007.948.100,- telah terealisasi sebesar Rp 2.611.063.235,- dengan persentase 86,81 % sedangkan pada tahun 2019 dengan pagu anggaran Rp 3.437.925.459,60,- telah terealisasi sebesar Rp Rp 2.992.782.867,- dengan persentase 87,05. Dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan sebesar 0,24 %. Pagu anggaran belanja yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 lebih besar dibandingkan dengan pagu anggaran pada tahun 2018, serta tahun 2019 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 dan untuk efisiensi dan efektivitas anggaran hanya ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang lebih prioritas dalam pembangunan Kabupaten Tanah Laut.

Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut mengalami beberapa hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana yang tersedia sudah cukup memadai namun belum optimal dalam penggunaannya.
2. Terbatasnya sumber daya manusia dan tenaga sebagai pelaksana kegiatan.
3. Kurang intensifnya koordinasi antar instansi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan.
4. Kurangnya komitmen para *leader* untuk menggunakan dan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut di atas diperlukan upaya-upaya penanggulangan antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan serta pengoptimalan dalam penggunaannya.

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tenaga melalui pendidikan dan pelatihan, seminar dan semacamnya serta penambahan personil tenaga pembantu.
3. Membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain untuk mempermudah pengkoordinasian.
4. Pembaharuan data untuk mengetahui daerah-daerah yang masih dalam kondisi *blank spot* sebagai bahan untuk pemberian rekomendasi pembangunan BTS kepada pihak ketiga.
5. Memberi dukungan kepada para *leader* untuk menggunakan Teknologi informasi dan Komunikasi.

C. Akuntabilitas Keuangan

Ringkasan Realisasi APBD SKPD 2018 dan 2019

Tabel 3.26 Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Belanja SKPD Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019

| No. | Uraian | Realisasi | | | % | Realisasi | | | % | Peningkatan /Penurunan (%) |
|------|---|-----------------|------------------------|---------------|--------|-----------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|
| | | Pagu Tahun 2018 | Pagu APBD-P Tahun 2018 | Tahun 2018 | | Pagu Tahun 2019 | Pagu APBD-P Tahun 2019 | Tahun 2019 | | |
| | | (Rp.) | | (Rp.) | | (Rp.) | (Rp.) | | | |
| 1 | 2 | 4 | | 4 | 5 | | | | | |
| 1. | PENDAPATAN | 408.000.000 | 449.814.000 | 470.302.000 | 104,55 | 471.936.000 | 471.936.000 | 447.356.000 | 94,79 | -9,76 |
| 1.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 408.000.000 | 449.814.000 | 470.302.000 | 104,55 | 471.936.000 | 471.936.000 | 447.356.000 | 94,79 | -9,76 |
| | Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi | 408.000.000 | 449.814.000 | 470.302.000 | 104,55 | 471.936.000 | 471.936.000 | 447.356.000 | 94,79 | -9,76 |
| | | | | | | | | | | |
| 2. | BELANJA | 4.033.481.062 | 5.133.905.262 | 4.396.069.371 | 85,63 | 6.028.126.461,6 | 6.889.210.326,6 | 5.987.707.238 | 86,91 | 1,28 |
| 2.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 2.042.356.162 | 2.125.957.162 | 1.785.006.136 | 83,96 | 3.377.358.978 | 3.451.284.867 | 2.994.924.371 | 86,78 | 2,82 |
| | Gaji dan Tunjangan | 1.489.082.278 | 1.480.470.964 | 1.203.796.136 | 81,31 | 1.489.082.278 | 1.530.508.167 | 1.348.429.741 | 88,10 | 6,79 |
| | Tambahan Penghasilan PNS | 553.273.884 | 645.486.198 | 581.210.000 | 90,04 | 1.888.276.700 | 1.920.776.700 | 1.646.494.630 | 85,72 | -4,32 |
| | | | | | | | | | | |
| 2.2. | BELANJA LANGSUNG | 1.991.124.900 | 3.007.948.100 | 2.611.063.235 | 86,81 | 2.650.767.483,6 | 3.437.925.459,60 | 2.992.782.867 | 87,05 | 0,24 |
| | Belanja Pegawai | 223.375.000 | 228.125.000 | 207.625.000 | 91,01 | 14.856.000 | 12.756.000 | 12.006.000 | 94,12 | 3,11 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|-----------------|-----------------|---------------|-------|-------|
| | Belanja Barang dan Jasa | 1.713.701.600 | 1.747.321.100 | 1.509.718.385 | 86,40 | 2.321.163.986 | 2.308.764.962 | 1.924.213.047 | 83,34 | -3,06 |
| | Belanja Modal | 54.048.300 | 1.032.502.000 | 893.719.850 | 86,56 | 314.747.497 | 1.116.404.497 | 1.056.563.820 | 94,64 | 8,08 |
| | | | | | | | | | | |
| | Jumlah | 3.625.481.062 | 4.684.091.262 | 3.925.767.371 | 83,81 | 5.556.190.461,6 | 6.417.274.326,6 | 5.540.351.238 | 86,33 | 2,52 |

Gambaran tabel 3.26 tersebut di atas menunjukkan bahwa pendapatan retribusi daerah pada tahun 2019 ada penurunan 9,76 % dari tahun 2018, namun kekurangan tersebut akan menjadi tambahan pendapatan pada tahun kedepannya. Pada pos belanja tahun ini realisasi penyerapan dananya sebesar Rp. 5.987.707.238,- (86,91 %) dengan kenaikan 1,28 % dari belanja tahun 2018 sebesar Rp. 4.396.069.371,- (85,63%).

Tabel 3.27 : Realisasi APBD SKPD Tahun 2019

| No. | Uraian | Anggaran | Realisasi | Lebih / (Kurang) |
|---|---|------------------|------------------|------------------------|
| | | (Rp.) | (Rp.) | |
| 1 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| 1. | PENDAPATAN | 471.936.000 | 447.356.000 | (24.580.000) |
| 1.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 471.936.000 | 447.356.000 | (24.580.000) |
| | Pendapatan Retribusi Pengendali Menara Telekomunikasi | 471.936.000 | 447.356.000 | (24.580.000) |
| 2. | BELANJA | 6.889.210.326,6 | 5.987.707.238 | (901.503.088,60) |
| 2.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 3.451.284.867 | 2.994.924.371 | (456.360.496) |
| | Gaji dan Tunjangan | 1.530.508.167 | 1.348.429.741 | (182.078.426) |
| | Tambahan Penghasilan PNS | 1.920.776.700 | 1.646.494.630 | (274.282.070) |
| 2.2. | BELANJA LANGSUNG | 3.437.925.459,60 | 2.992.782.867 | (445.142.592,6) |
| | Belanja Pegawai | 12.756.000 | 12.006.000 | (750.000) |
| | Belanja Barang | 2.308.764.962 | 1.924.213.047 | (384.551.915) |
| | Belanja Modal | 1.116.404.497 | 1.056.563.820 | (59.840.677) |
| SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) | | 6.417.274.326,60 | 5.540.351.238,00 | (876.923.088,6) |

Dilihat dari pendapatan yang diperoleh dan realisasi belanja yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tahun 2019 ini mengalami **SILPA** anggaran pembiayaan sebesar **Rp. 876.923.088,6,-** (*Delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh delapan koma enam rupiah*).

Ringkasan Anggaran dan Realisasi APBD SKPD 2018 Berdasarkan Program

a. Realisasi Belanja Tidak Langsung

Tabel 3.28 : Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2019

| No. | Uraian | Pagu anggaran Rp. | Realisasi Rp. | % |
|---------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 1.114.762.215,00 | 1.039.037.100,00 | 93,21 |
| 2 | Tunjangan Keluarga | 121.248.232,00 | 93.663.876,00 | 77,25 |
| 3 | Tunjangan Jabatan | 147.630.000,00 | 128.625.000,00 | 87,13 |
| 4 | Tunjangan Fungsional | 19.600.000,00 | 9.840.000,00 | 50,20 |
| 5 | Tunjangan Fungsional Umum | 27.630.000,00 | 22.540.000,00 | 81,58 |
| 6 | Tunjangan Beras | 69.957.720,00 | 49.535.280,00 | 70,81 |
| 7 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 28.980.000,00 | 5.172.654,00 | 17,85 |
| 8 | Pembulatan Gaji | 700.000,00 | 15.831,00 | 2,26 |
| 9 | Tunjangan Penghasilan PNS berbasis kinerja | 1.920.776.700,00 | 1.646.494.630,00 | 85,72 |
| Jumlah | | 3.451.284.867,00 | 3.451.284.867,00 | 86,78 |

b. Realisasi Belanja Langsung

Tabel 3.29 : Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2019

| No. | Program/ Kegiatan | Pagu Anggaran Rp. | Realisasi Rp. | % |
|-----|--|----------------------|------------------|---------|
| I. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.014.144.059,60 | 906.593.485,00 | 89,39 % |
| II | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 45.000.000,00 | 0,00 | 0 % |
| III | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 2.551.900,00 | 1.556.000,00 | 60,97 % |
| IV | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan | 1.831.628.100,00 | 1.645.492.645,00 | 89,84 % |

| No. | Program/ Kegiatan | Pagu Anggaran Rp. | Realisasi Rp. | % |
|---------------|---|-------------------------|-------------------------|----------------|
| | Media Massa | | | |
| V | Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media | 172.809.800,00 | 143.889.790,00 | 83,26 % |
| VI | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Kominfo | 44.787.500,00 | 4.260.197,00 | 9,51 % |
| VII | Pogram Pengembangan Data/Informasi | 28.054.100,00 | 22.215.750,00 | 79,19 % |
| VIII | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset daerah | 4.500.000,00 | 975.000,00 | 21,67 % |
| Jumlah | | 3.437.925.459,60 | 2.992.782.867,00 | 87,05 % |

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Pemerintah, dan juga merupakan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya *good governance*. Dalam perseptif, Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan kata lain Laporan Kinerja pada dasarnya merupakan laporan kepada pihak publik/eksternal walaupun manfaatnya lebih banyak kepada pihak internal. Oleh karena itu penyajian informasi dalam Laporan Kinerja harus dipertimbangkan untuk dapat dipergunakan oleh pihak luar.

Hasil evaluasi kinerja ini merupakan hasil evaluasi kinerja dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, hal ini juga berarti bahwa kinerja dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dengan **realisasi fisik 87,83%** dan **realisasi anggaran 87,05 %**, dengan kategori capaian **Memuaskan**, walaupun dalam beberapa hal masih ada hambatan atau kendala yang harus diperbaiki pada tahun-tahun mendatang secara terus-menerus.

Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut mengalami beberapa hambatan dan

kendala. Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana yang tersedia sudah cukup memadai namun belum optimal dalam penggunaannya.
2. Terbatasnya sumber daya manusia dan tenaga sebagai pelaksana kegiatan.
3. Kurangnya intensifnya koordinasi antar instansi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan.
4. Kurangnya komitmen para *leader* untuk menggunakan dan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut di atas diperlukan upaya-upaya penanggulangan antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan serta pengoptimalan dalam penggunaannya.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tenaga melalui pendidikan dan pelatihan, seminar dan semacamnya serta penambahan personil tenaga pembantu.
3. Membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain untuk mempermudah pengkoordinasian.
4. Pembaharuan data untuk mengetahui daerah-daerah yang masih dalam kondisi *blank spot* sebagai bahan untuk pemberian rekomendasi pembangunan BTS kepada pihak ketiga.
5. Memberi dukungan kepada para *leader* untuk menggunakan Teknologi informasi dan Komunikasi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019 ini merupakan laporan pertanggung jawaban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Diharapkan saran serta

masuk dari semua pihak guna perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

B. Strategi Peningkatan

Dalam rangka peningkatan kinerja yang lebih baik dalam beberapa tahun ke depan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut telah membuat rancangan *road map* pembangunan infrastruktur E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun kedepannya yang meliputi sebagai berikut:

1. Tanah Laut *Smart Government* dan *Smart City*

Tanah Laut *Smart Government* meliputi *smart* perencanaan, monitoring, evaluasi, pembangunan kapasitas, serta implemetasi kebijakan. Sedangkan *Smart City* memiliki makna bahwa diharapkan untuk kedepannya Kabupaten Tanah Laut memiliki manfaat dari keberadaan teknologi komunikasi dan informasi yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Laut dalam bentuk peningkatan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Tanah Laut *Smart city* meliputi penyediaan layanan pemerintahan, *public safety*, kependudukan *online*, *security surveilane*, *smart* UKM (pengusaha kecil dan menengah), layanan *digital park* (perpustakaan digital, konten pendidikan *online*) dan lain sebagainya. Pelaksanaannya terbagi dalam dua tahapan yaitu pada pembangunan *Smart Government* dan Pembangunan fasilitas *Smart City*.

2. Pembangunan Kabupaten Tanah Laut Yang Berbasis Data.

Pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan haruslah didasarkan atau dilandasi kepada Data dan informasi yang akurat dan terbaru guna memberikan dukungan kepada Pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya dalam penentuan arah dan sasaran pembangunan. Hal tersebut dapat terjadi manakala terfasilitasi dengan baik melalui pengintegrasian secara terpadu antara

pengumpulan dan pengolahan data dan informasi dengan berbasis kepada Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pelaksanaannya dengan tahapan perencanaan dan pembangunan *data/command center* serta jaringan fiber optik antar SKPD dan tower bersama sebagai infrastruktur penunjang dalam mendukung *Smart Government* dan *Smart City*.

3. Pelaksanaan dan Penerapan kaidah-kaidah SPBE.

Memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat adalah salah satu tujuan dari pelaksanaan segala urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebanyak 31 Urusan. Hal tersebut dapatlah terlaksana secara optimal apabila dilakukan dengan menggunakan Teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi masing-masing urusan, yang semula hanya dilaksanakan secara manual sehingga membutuhkan tenaga, waktu dan biaya yang besar pula dan hal ini tentunya jauh dari apa yang diinginkan oleh pelaksanaan SPBE yaitu salah satunya azas efisiensi dan efektifitas pengelolaan pemerintahan.

4. Keterbukaan dan Transparansi Informasi Bagi Masyarakat.

Seiring dengan semakin berubahnya pola pikir masyarakat yang semakin maju, kritis, dan berkembang membuat tuntutan terhadap keterbukaan dan transparansi akan data dan informasi semakin tinggi pula. Hal ini berimbas kepada semakin kritis dan beraninya masyarakat terhadap akses dalam menyampaikan pendapat dan akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapinya.

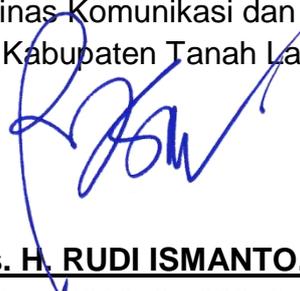
5. Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat akan Teknologi Komunikasi dan Informasi Berbasis Kearifan Lokal.

Perkembangan teknologi pada bidang komunikasi dan informasi yang semakin berkembang dengan pesat dan cepat peril di respon dan dilakukan antisipasi terhadap dampak yang akan timbul baik itu dampak positif maupun negatif. Hal ini dapat terjadi apabila

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bersikap responsif dan antisipatif melalui pelaksanaan dan pengembangan program-program dan kegiatan-kegiatan yang bersifat pemanfaatan terhadap kebijakan-kebijakan atau kearifan lokal yang masih ada dan bertahan di tengah masyarakat saat ini.

Pelaihari, Februari 2019

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanah Laut



Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si

NIP. 19680916 199010 1 001